

A J U R N A L ANALISIS SOSIAL

Edisi 4/November 1996

ANALISIS GENDER Dalam Memahami Persoalan Perempuan

- ♦ Gender Sebagai Alat Analisis Sosial
Mansour Faqih
- ♦ Penelitian Berperspektif Gender
Hesti R. Wijaya
- ♦ Sensitivitas Gender Dalam Perumusan Kebijakan Publik
Hetifah Sjaifudian
- ♦ Kepentingan Perempuan Dalam Pembentukan Civil Society
Ratna Saptari dan Artien Utrecht
- ♦ Focus Groups: Teknik Pelaksanaan
Rimbo Gunawan

DAFTAR ISI

EDITORIAL

- ♦ Mengidentifikasi Persoalan Perempuan 3

BAHASAN UTAMA

- ♦ *Gender* Sebagai Alat Analisis Sosial..... 7
- ♦ Penelitian Berperspektif *Gender*..... 21
- ♦ Sensitivitas *Gender* Dalam Perumusan Kebijakan Publik..... 37
- ♦ Kepentingan Perempuan Dalam Pembentukan *Civil Society* 45

DAFTAR ISTILAH

- ♦ Istilah-istilah Umum Dalam Wacana *Gender*..... 57

RUANG METODOLOGI

- ♦ *Focus Groups*: Teknik Pelaksanaan 61

RESENSI BUKU

- ♦ Posisi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan:
Sebuah Kajian Historis..... 75

BERITA PERPUSTAKAAN

- ♦ Sistem Pelayanan Informasi di AKATIGA 79

SEPUTAR AKATIGA..... 85

PUBLIKASI 89

● **Topik Edisi Mendatang !!** ●
Edisi 5 : Buruh Anak
Edisi 6 : Peran LSM Dalam Proses Perubahan

Pemimpin Umum : Direktur Eksekutif AKATIGA

Tim Redaksi : Indrasari Tjandraningsih, Frida Rustiani, dan Rina Herawati

Penyunting Bahasa : A. Diana Handayani

Penata Letak & Perancang kulit : Budiman Pagarnegara

Diterbitkan Oleh : Yayasan AKATIGA - Pusat Analisis Sosial

Alamat Redaksi : Jl. Raden Patah 28 Bandung 40132, Telp./Faks: (022) 2502622

E-Mail : AKATIGA@Melsa.net.id

MENGIDENTIFIKASI PERSOALAN PEREMPUAN

♦ Pendahuluan

Pembahasan mengenai persoalan perempuan harus diletakkan dalam konteks tertentu untuk memahami esensi-nya dan sebab-sebab munculnya persoalan. Dalam hal ini konteks yang paling relevan adalah konteks pembangunan dan struktur sosial masyarakat. Berbagai laporan, artikel, dan hasil penelitian mengenai perempuan dan pembangunan menyimpulkan bahwa pembangunan membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi perempuan.

Konsep pembangunan yang diterapkan di seluruh dunia kini adalah konsep Barat yang pada intinya akan mengubah alam kehidupan tradisional menjadi modern yang diwujudkan dalam struktur ekonomi industri untuk menggantikan struktur ekonomi pertanian. Perubahan struktur ini bermakna pula introduksi dan penggunaan teknologi baru secara besar-besaran yang berdampak negatif bagi perempuan. Dampak Revolusi Hijau terhadap marginalisasi perempuan merupakan contoh

nyata dampak negatif pembangunan terhadap perempuan. Modernisasi pertanian dengan teknologi baru yang serba mesin ternyata menghilangkan kesempatan kerja bagi perempuan dan mengubah sistem pembagian kerja berdasarkan *gender* yang memunculkan pula gejala reduksi peran ekonomi perempuan. Reduksi peran ekonomi tersebut kemudian membawa dampak ikutan yang berwujud penurunan status perempuan di dalam masyarakat. Perempuan menjadi warga kelas dua setelah kaum laki-laki.

Sebagai warga kelas dua, perempuan menjadi obyek dari berbagai upaya perubahan yang disusun dalam kerangka berpikir yang mengacu pada asumsi-asumsi yang bersifat sangat bias laki-laki. Bias laki-laki ini menjadi salah satu faktor yang menjelaskan mengapa perempuan tertinggal atau ditinggalkan dalam proses pembangunan. Ketika kemudian muncul kesadaran bahwa keteringgalan perempuan sudah terlalu jauh sehingga dapat mengganggu keseluruhan proses, disusunlah berbagai program yang bertujuan pokok 'mengintegrasikan

perempuan dalam pembangunan'. Secara prinsip program-program yang ingin mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan sendiri sudah menjelaskan logika dasarnya bahwa sebelumnya perempuan bukanlah pelaku dan tidak berpartisipasi di dalam pembangunan sehingga perlu diraih untuk diikutsertakan dalam proses itu.

Akar munculnya persoalan perempuan juga tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor ideologi, struktural, dan kultural. Ketiga-nya secara saling berkait mengukuhkan sebuah situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi perempuan. Ideologi patriarki bergandengan dengan ideologi *gender* telah merasuki struktur dan sistem sosial-kultural masyarakat yang menempatkan perempuan di posisi pinggiran. Internalisasi nilai-nilai patriarki yang mengunggulkan peran dan status manusia lelaki telah mendukung terciptanya peran dan status manusia perempuan yang bersifat sekunder. Kondisi semacam itu pada dasarnya merupakan manifestasi dari diskriminasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya, juga hukum dan agama terhadap perempuan.

Akibat diskriminasi tersebut muncul berbagai persoalan lain yang dapat dikategorikan spesifik perempuan seperti beban ganda, marginalisasi, domestikasi, pelecehan dan kekerasan seksual maupun

nonseksual, dan sebagainya. Pada intinya, dapat dikatakan bahwa persoalan-persoalan perempuan merupakan suatu manifestasi dari suatu bentuk hubungan yang asimetris antara jenis kelamin, serta antara kelas dan ras.

♦ **Bagaimana Memahami
Persoalan Perempuan?**

Secara umum, masih sedikit di antara kita yang menyadari dan memahami bahwa perempuan menghadapi persoalan yang *gender-specific* artinya persoalan yang hanya muncul karena seseorang atau satu kelompok orang menyandang *gender* perempuan. Tidak saja di kalangan kaum laki-laki, tetapi kaum perempuan sendiri masih banyak yang tidak mempunyai kesadaran tersebut. Banyak indikator yang dapat menunjukkan keadaan *unawareness* tersebut dalam pergaulan sehari-hari. Masih banyak yang tidak bisa mengerti mengapa persoalan perempuan harus dibahas dan diperhatikan secara khusus. Hal ini terjadi akibat kentalnya penanaman nilai-nilai mengenai peran lelaki dan perempuan. Bahwa perempuan sudah kodratnya merupakan 'ratu rumah tangga' dan pengendali urusan domestik menjadi nilai yang begitu dominan dalam masyarakat kita, sehingga pikiran-pikiran mengenai kesempatan beraktivitas di luar domain rumah tangga dianggap sebagai sesuatu

yang mengada-ada. Jargon pembangunan tentang persamaan perlakuan dan kesempatan kepada laki-laki dan perempuan justru menjadi penyumbang bagi ketidak-mengertian orang terhadap ide dan gerakan yang memperjuangkan perbaikan posisi dan status perempuan. Ungkapan yang terlonjar, baik oleh laki-laki maupun perempuan, dalam berbagai forum ilmiah yang mempertanyakan diangkatnya topik permasalahan spesifik perempuan dengan argumentasi bahwa kini kesempatan sudah sama untuk laki-laki dan perempuan, perempuan sudah banyak yang berpendidikan tinggi dan berkarir di luar rumah, dan sebagainya memberikan pertanda yang jelas bagaimana ketimpangan pengetahuan masyarakat mengenai persoalan perempuan.

Sejak dekade 70-an, ketika persoalan ketertinggalan perempuan mulai disadari dan program-program pengintegrasian perempuan mulai disebarluaskan, muncul kritik terhadap asumsi dasar program tersebut yang menganggap bahwa ketertinggalan perempuan bukan berasal dari sistem melainkan dari perempuan sendiri. Berkaitan dengan itu kemudian muncul ide bahwa dalam melihat persoalan perempuan - yang akan dijadikan dasar penyusunan berbagai kebijakan dan program untuk perempuan - diperlukan cara pandang baru yang lebih obyektif

dan terlepas dari nilai-nilai yang mengandung bias. Alternatif tersebut adalah penggunaan kerangka analisis *gender* dan bidang Studi Perempuan.

Jurnal kali ini bermaksud memperkenalkan cara melihat dan memahami persoalan perempuan sehingga didapatkan gambaran yang riil serta kontekstual. Diawali oleh Dr. Mansour Faqih yang diundang untuk membahas bagai-mana *gender* difungsikan sebagai alat analisis sosial dalam memahami persoalan perempuan. Di dalam uraiannya dibahas mengenai perdebatan dan perbedaan dua pemikiran yang berfokus pada persoalan perempuan saja sebagai suatu persoalan yang berdiri sendiri dan pemikiran yang meletakkan persoalan-persoalan perempuan sebagai bagian dari sistem dan struktur masyarakat. Pikiran yang terakhir adalah pikiran yang berlandaskan analisis *gender*. Di samping itu, disampaikan juga apa sebenarnya persoalan-persoalan yang muncul yang menimpa perempuan dilihat dari kacamata analisis *gender* tersebut.

Mengingat bahwa penelitian-penelitian untuk mengangkat persoalan perempuan makin banyak dilakukan maka perlu bagi kita untuk mengetahui bagaimana sebenarnya cara mengangkat topik tersebut dalam penelitian. Untuk itu, Dr. Hesti Wijaya menulis mengenai penelitian berperspektif *gender* untuk menjelaskan apa maksudnya

dan apa yang mem-bedakannya dengan metode penelitian yang konvensional. Tulisan ini sekaligus juga menjelaskan mengenai studi perempuan dan metode-metode yang digunakan-nya.

Di sektor kebijakan, Ir. Hetifah Sjaifuddin, MPP melihat bukti ketertinggalan perempuan baik di dalam substansi kebijakannya maupun di dalam proses penyusunannya yang menandakan ketidakpekaan *gender* di kalangan perumus kebijakan. Tulisannya mencoba menjelaskan apa dampak perumusan kebijakan yang '*gender-blind*' baik bagi perempuan maupun bagi keseluruhan tatanan masyarakat dan menyajikan pikiran bagaimana membuka kepekaan *gender* bagi perumus kebijakan.

Dalam konteks yang lebih luas, sebagai penutup bahasan utama jurnal ini Dr. Ratna Saptari dan Ir. Artien Utrecht, MA melontarkan ide mengenai posisi perjuangan kelompok perempuan dan penampilan isu *gender* dalam konstelasi politik nasional. Kedua penulis akan memperlihatkan bagaimana persoalan perempuan di hadapan negara dipilah-pilah menjadi persoalan politik dan masalah perempuan. Melalui masalah-masalah pertanahan, perburuhan, dan masalah kekerasan seksual ditunjukkan pula bagaimana isu *gender* memudar ketika persoalan terangkat menjadi

konsumsi publik. Artikel ini juga menyoroti bagaimana kelompok perempuan sebagai sebuah gerakan bereaksi terhadap kondisi persoalan yang semacam itu.

Untuk melengkapi jurnal ini ditampilkan sebuah daftar istilah umum dalam pembahasan *gender*. Sebagai suatu upaya introduksi pemahaman *gender* untuk mengenali persoalan perempuan, mudah-mudahan jurnal ini dapat memicu diskusi yang lebih luas mengenai cara pandang dan pendekatan yang tepat untuk persoalan tersebut. ♦
(Indrasari Tjandraningsih)

***GENDER* SEBAGAI ALAT ANALISIS SOSIAL**

Dr. Mansour Fakih

Dalam dasawarsa terakhir, kita menyaksikan suatu proses perubahan paradigma melalui perdebatan yang panjang dalam gerakan feminisme, yakni antara pemikiran yang lebih memfokuskan ‘masalah perempuan’ berhadapan dengan pemikiran yang memfokuskan sistem dan struktur masyarakat yang dilandaskan pada ‘analisis *gender*’. Tulisan ini akan menguraikan inti masalah pertikaian antara kedua pemikiran tersebut dan bagaimana implikasi masing-masing pemikiran terhadap nasib kaum perempuan. Selanjutnya tulisan ini mencoba menyajikan apa sebenarnya yang dipermasalahkan dalam pendekatan yang menggunakan analisis *gender*¹. Oleh karena itu, di sini perlu diperjelas mengenai apa yang dimaksud dengan ‘*gender*’ dan analisis *gender* serta implikasi analisis tersebut terhadap analisis sosial dan setiap usaha perubahan sosial.

¹ Untuk uraian lebih lanjut lihat: Mansour Fakih (1996) *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

♦ ***Analisis Mainstream Terhadap Persoalan Perempuan dan Kritiknya***

Aliran sosial yang memfokuskan ‘persoalan perempuan’ sebagai sasaran analisis, pada dasarnya merupakan ‘aliran *mainstream*’ dalam perbincangan mengenai nasib dan program kaum perempuan. Analisis ini berdasar pada asumsi bahwa permasalahan kaum perempuan berakar pada rendahnya kualitas sumber daya kaum perempuan itu sendiri, yang mengakibatkan mereka tidak mampu bersaing dengan kaum lelaki dalam masyarakat, termasuk dalam pembangunan. Oleh karena itu dalam analisis ini harus ada usaha untuk menghilangkan diskriminasi yang menghalangi usaha mendidik kaum perempuan. Moser (1989) membagi analisis atas ketinggalan kaum perempuan ini menjadi beberapa aliran yang sebagian besar berlandaskan pada paham modernisasi. Pendekatan yang sangat dipengaruhi oleh modernisasi tersebut adalah analisis ‘pengentasan

kemiskinan' (*antipoverty*). Dasar pemikiran analisis ini adalah bahwa perempuan miskin karena mereka kurang memiliki akses terhadap sumber daya alam ataupun tidak produktif. Oleh karena itu, perlu diciptakan 'proyek peningkatan pendapatan' bagi kaum perempuan. Paham analisis yang lain adalah 'pendekatan efisiensi' yakni pemikiran bahwa pembangunan mengalami kegagalan karena perempuan tidak dilibatkan. Dengan demikian, pelibatan itu sendiri lebih demi efisiensi pembangunan. Analisis seperti ini lebih memfokuskan pada kaum perempuan dan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan praktis kaum perempuan semata.

Pendekatan efisiensi dan pengentasan kemiskinan (*antipoverty*) ini menjadi aliran *mainstream* mengenai usaha memecahkan masalah-masalah perempuan. Sebagian besar organisasi Internasional seperti badan-badan PBB, Bank Dunia, USAID, ODA, dan hampir semua pemerintah 'Dunia Ketiga', bahkan sebagian besar kalangan LSM di Indonesia juga menganut pemikiran tersebut. Melalui program global yang dikenal dengan '*Women In Development*' atau WID, pemikiran yang berasal dari feminisme liberal ini laksana mendapatkan institusinya sehingga mendominasi wacana, pemikiran, serta bentuk-bentuk proyek yang terfokus pada

perempuan di lapangan. Tidak lupa mekanisme global ini juga telah melahirkan para ahli, konsultan serta menjamurnya 'Pusat Studi Perempuan' di berbagai universitas dewasa ini. Banyak orang gelisah dengan munculnya birokratisasi pengetahuan tentang 'pembangunan perempuan' karena justru teralienasi dengan persoalan-persoalan nyata kaum perempuan di masyarakat kelas bawah. Bahkan program global ini juga ikut mendorong bermunculannya "Departemen Peranan Perempuan" hampir di setiap pemerintahan di dunia Ketiga.

Feminisme liberal yang menjadi landasan analisis ini sesungguhnya muncul sebagai kritik terhadap teori politik liberal umumnya yang menjunjung tinggi nilai otonomi, persamaan dan nilai moral, serta kebebasan individu, namun pada saat yang sama dianggap mendiskriminasi kaum perempuan. Dalam mendefinisikan masalah kaum perempuan, mereka tidak melihat struktur dan sistem sebagai pokok permasalahan. Asumsi dasar feminisme liberal berakar pada pandangan bahwa kebebasan dan ekuualitas berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan umum. Kerangka feminisme liberal dalam memperjuangkan persoalan masyarakat tertuju pada 'kesempatan yang sama dan hak yang sama' bagi setiap 'individu' termasuk di dalamnya hak dan

BAHASAN UTAMA

kesempatan kaum perempuan. Kesempatan dan hak yang sama antara lelaki dan perempuan ini penting bagi mereka dan karenanya tidak perlu ada pembedaan kesempatan antara lelaki dan perempuan. Hal ini karena adanya asumsi mereka bahwa 'perempuan adalah makhluk rasional' juga. Oleh karena itu ketika menyolkan mengapa kaum perempuan tertinggal, feminisme liberal beranggapan bahwa hal itu disebabkan oleh 'salah mereka sendiri'. Dengan kata lain jika sistemnya sudah memberikan kesempatan yang sama kepada lelaki dan perempuan, kemudian kaum perempuan tidak mampu bersaing dan kalah maka yang perlu disalahkan adalah kaum perempuan sendiri.

Atas dasar itu untuk memecahkan masalah kaum perempuan, mereka mengajukan cara menyiapkan kaum perempuan untuk bisa bersaing dalam suatu dunia yang penuh persaingan bebas tersebut. Sebagian dari usaha ini dapat dilihat misalnya dalam program *Women In Development* yakni dengan menyediakan 'program intervensi untuk meningkatkan taraf hidup keluarga seperti pendidikan, keterampilan', serta 'kebijakan yang dapat meningkatkan kemampuan perempuan untuk mampu berpartisipasi dalam pembangunan'. Pendekatan yang berasumsi bahwa keterbelakangan kaum perempuan itu masalahnya terletak pada kaum

perempuan sendiri, sehingga diperlukan usaha untuk menggarap kaum perempuan kini diperlakukan sebagai *mainstream* dalam memecahkan masalah kaum perempuan. Bagi mereka, diskriminasi akibat ideologi patriarki seperti yang diyakini oleh feminisme radikal maupun analisis atas struktur 'kelas' politik ekonomi serta *gender* seperti paham feminis sosialis tidaklah dipertanyakan. Bagi mereka, sejak awal perempuan dianggap sebagai masalah (*anomaly*) bagi ekonomi modern atau partisipasi politik maupun pembangunan. Keterbelakangan kaum perempuan bagi mereka adalah akibat dari sikap irasional yang bersumber dari berpegang teguh pada peran *gender* tradisional. Oleh karena itu, melibatkan perempuan dalam industri-alisasi dan pembangunan dianggap sebagai jalan untuk meningkatkan status perempuan. Keduanya dianggap akan berakibat positif pada perempuan, yakni akan mengurangi akibat dari ketidak-samaan kekuatan biologis antara lelaki dan perempuan.

Analisis ini mendapat sejumlah kritik dari sejumlah feminis lain, di antaranya dari kaum feminis radikal. Bagi mereka, unsur seksual atau biologis memainkan sejumlah peranan penting dalam politik alamiah hubungan antarkelamin tersebut. Dengan demikian, analisis mengenai penyebab penindasan

terhadap kaum perempuan oleh kaum lelaki harus berakar pada jenis kelamin kaum lelaki itu sendiri beserta ideologi patriarki mereka. Jadi, dengan demikian 'kaum lelaki' secara biologis maupun secara politis adalah bagian dari permasalahan (Jaggar, 1977). Patriarki yang merupakan sistem hierarki seksual di mana lelaki memiliki kekuasaan *superior* dan *privilege* ekonomi dianggap sebagai pokok masalah. Akan tetapi, analisis mereka dianggap ahistoris² oleh golongan feminisme yang lain, seperti feminis Marxist. Meskipun mereka menggunakan bahasa Marxist seperti 'kelas' dalam melakukan analisis hubungan antara lelaki dan perempuan, namun mereka tidak menggunakan kerangka teori kelas secara sungguh-sungguh. Hubungan *gender* direduksi pada perbedaan natural yang bersumber pada biologi³. Bagi mereka revolusi terjadi pada setiap perempuan yang telah mengambil aksi untuk mengubah gaya hidup, pengalamanan, dan hubungan mereka sendiri terhadap kaum lelaki. Semboyan terkenal mereka adalah *personal is political*.

² Lihat: Jaggar A. 1983. *Feminist Politics and Human Nature*. Brighton: Harvester Press.

³ Lihat: Firestone, S. 1970. *The Dialektik of Sex: The Case for Feminist Revolution*. New York: William Morrow and Co. Inc.

Faham ini bertentangan dengan feminisme Marxist yang melihat penindasan perempuan sebagai realitas obyektif. Mereka menolak gagasan biologi sebagai dasar pembedaan *gender*. Bagi mereka penindasan perempuan adalah bagian dari penindasan kelas dalam relasi produksi. *Women question* selalu diletakkan dalam kerangka kritik pada kapitalisme. Dalam teorinya Marx sendiri tidak menjelaskan tentang posisi kaum perempuan dalam perubahan sosial, namun sahabatnyalah, Engels, yang mengulas masalah ini dalam sejarah prakapitalisme. Engels dalam uraian tersebut menjelaskan bahwa sejarah jatuhnya status perempuan bukanlah disebabkan oleh perubahan teknologi, melainkan karena perubahan organisasi kekayaan. Munculnya era hewani piaraan dan petani menetap, yakni suatu masa awal penciptaan 'surplus' adalah dasar munculnya *private property* yang kemudian menjadi dasar bagi perdagangan dan produksi untuk *exchange*. Oleh karena lelaki mengontrol produksi untuk *exchange* maka mereka mendominasi hubungan sosial dan politik sementara perempuan direduksi menjadi bagian dari properti belaka.

Berbeda dengan analisis kaum feminis liberal yang lebih memfokuskan kaum perempuan, analisis mereka lebih tertuju pada sistem kapitalisme. Penindasan perempuan bagi mereka dilang-gengkan oleh

BAHASAN UTAMA

kapitalisme melalui berbagai cara dan alasan, di antaranya melalui apa yang disebut 'eksploitasi pulang ke rumah', yakni suatu proses yang diperlukan guna membuat lelaki yang dieksploitasi di pabrik bekerja lebih produktif. Buruh lelaki yang bekerja di pabrik dan dieksploitasi oleh kapitalis selanjutnya pulang ke rumah dan terlibat suatu hubungan kerja dengan istri mereka. Dalam analisis ini, posisi kaum perempuan lebih ditujukan demi akumulasi kapital. Kaum perempuan juga dianggap berman-faat bagi kapitalisme dalam mereproduksi buruh murah. Di negara kapitalis struktur dan sistem masyarakat mereka mengun-tungkan pihak kapitalis dari segi terjaminnya persediaan buruh. Masuknya perempuan sebagai buruh juga menguntungkan sistem kapitalisme karena pertama, upah buruh perempuan seringkali lebih rendah dibandingkan dengan upah buruh lelaki. Upah buruh yang lebih rendah ini membantu pihak kapitalis untuk akumulasi kapital secara lebih cepat. Kedua, masuk-nya kaum perempuan ke sektor perburuhan merupakan proses penciptaan buruh cadangan yang tak terbatas. Besarnya cadangan buruh ini akan lebih memperkuat posisi tawar kaum kapitalis di hadapan buruh, sekaligus meng-ancam solidaritas kaum buruh. Bagi penganut feminisme Marxist, penindasan perempuan merupakan kelanjutan dari sistem eksploitatif yang bersifat struktural. Oleh karena

itu, mereka tidak meng-anggap patriarki kaum lelaki sebagai permasalahan.

Kritik datang juga dari feminisme sosialis. Analisis mereka adalah sintesis antara metode historis materialis dan ide *personal is political*. Penindasan perempuan bagi mereka terjadi di kelas manapun, bahkan revolusi sosialis ternyata tidak serta-merta menaikkan posisi perempuan. Atas dasar itu mereka menolak visi Marxist klasik yang meletakkan eksploitasi ekonomi sebagai dasar penindasan *gender*. Sebaliknya feminisme tanpa kesadaran kelas juga menimbulkan masalah. Oleh karena itu, analisis patriarki perlu dikawinkan dengan analisis kelas. Dengan begitu kritik terhadap eksploitasi kelas dari sistem kapitalisme pada saat yang sama harus disertai kritik ketidakadilan *gender* yang mengakibatkan dominasi, subordinasi, dan margi-nalisasi atas kaum perempuan. Penindasan perempuan bagi mereka juga bisa menimbulkan kesadaran revolusi, tetapi bukan kesadaran *women as sex* model feminis radikal. Sebaliknya bagi mereka ketidakadilan terhadap perempuan lebih karena ideologi (*social construction*) terhadap perbedaan lelaki - perempuan. Ketidakadilan juga bukan karena kegiatan produksi atau reproduksi dalam masyarakat, melainkan karena manifestasi dari ketidak-adilan *gender* yang

merupakan konstruksi sosial. Oleh karena itu, yang mereka perangi adalah konstruksi visi dan ideologi masyarakat serta struktur dan sistem yang tidak adil yang dibangun di atas bias *gender*.

Kritik mereka terhadap feminisme liberal terletak pada anggapan adanya korelasi positif antara partisipasi dalam produksi dan publik serta status perempuan. Partisipasi perempuan dalam ekonomi memang perlu, tetapi tidak selalu akan menaikkan statusnya. Rendahnya partisipasi memang berkorelasi dengan rendahnya status perempuan, tetapi keterlibatan perempuan juga bisa menjerumuskan mereka pada beban ganda, karena mereka tetap berposisi subordinatif. Akibatnya, partisipasi perempuan dalam ekonomi justru membawa perempuan pada antagonisme seksual daripada menaikkan statusnya.

Usaha kaum feminis liberal untuk mendidik kaum perempuan agar setara dan mampu bersaing dengan kaum lelaki hanya akan menghasilkan perubahan praktis jangka pendek. Paradigma yang lebih memfokuskan 'kaum perempuan' ini mulai mendapat tantangan dari mereka yang lebih mengusahakan perubahan posisi perempuan, yakni perubahan jangka panjang yang bersifat strategis, termasuk mendekon-struksi ketidakadilan *gender*. Analisis

gender yang tadinya banyak dipergunakan oleh feminis sosialis, saat ini telah menjadi alat analisis yang dipergunakan oleh hampir setiap organisasi yang memperjuangkan nasib kaum perempuan. Uraian berikut, akan melihat kembali bagaimana *gender* sebagai alat analisis bisa dipergunakan untuk pemberdayaan kaum perempuan.

♦ Analisis Gender Sebagai Alternatif

Analisis *gender* sebagai alat analisis konflik memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural yang disebabkan oleh *gender*. *Gender*, sebagaimana dituturkan oleh Oakley (1972) dalam *Sex, Gender and Society* berarti perbedaan jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis jenis kelamin (*sex*) merupakan kodrat Tuhan, karenanya secara permanen dan universal berbeda. Sementara *gender* adalah *behavioral differences* antara lelaki dan perempuan yang *socially constructed*, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ciptaan Tuhan, melainkan diciptakan, baik oleh kaum lelaki maupun perempuan, melalui proses sosial dan budaya yang panjang. Caplan (1987) dalam *The Cultural Construction of Sexuality* menegaskan bahwa perbedaan perilaku antara lelaki dan perempuan selain

BAHASAN UTAMA

yang biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan kultural. Oleh karena itu, *gender* berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, bahkan dari kelas ke kelas, sementara jenis kelamin (*sex*) tidak berubah.

Perbedaan *gender* (*gender differences*) yang selanjutnya melahirkan peran *gender* (*gender role*) sesungguhnya tidaklah menimbulkan masalah atau tidak perlu digugat. Jadi, kalau secara biologis (kodrat) kaum perempuan dengan organ reproduksinya bisa hamil, melahirkan, dan menyusui lalu mempunyai peran *gender* sebagai perawat, pengasuh, dan pendidik anak, sesungguhnya tidak ada masalah dan tidak perlu digugat. Persoalannya ialah ternyata peran *gender* tradisional perempuan dinilai lebih rendah dibanding peran *gender* lelaki. Selain itu, peran *gender* ternyata menimbulkan masalah yang perlu digugat yakni ketidakadilan yang ditimbulkan oleh peran dan perbedaan *gender* tersebut. Berbagai manifestasi ketidakadilan yang ditimbulkan oleh adanya asumsi *gender* adalah sebagai berikut:

Pertama, terjadi ***marginalisasi*** (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan. Meskipun tidak setiap marginalisasi disebabkan oleh ketidakadilan *gender*, namun yang dipersoalkan dalam analisis *gender* adalah marginalisasi yang

disebabkan oleh perbedaan *gender*. Misalnya banyak perempuan desa tersingkirkan dan menjadi miskin akibat program pertanian revolusi hijau yang hanya memfokuskan petani lelaki. Hal ini karena adanya asumsi bahwa petani itu identik dengan petani lelaki. Atas dasar itu, banyak petani perempuan tergusur dari sawah dan pertanian, bersamaan dengan tergusurnya *ani-ani*. Begitu pula dengan kredit untuk petani yang artinya hanya untuk petani lelaki serta training pertanian yang hanya ditujukan pada petani lelaki. Jadi, yang dipermasalahkan di sini adalah pemiskinan petani perempuan akibat dari bias *gender*. Di luar dunia pertanian, banyak sekali pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan, seperti guru taman kanak-kanak ataupun sekretaris yang dinilai lebih rendah dibanding pekerjaan lelaki dan seringkali berpengaruh terhadap perbedaan gaji di antara kedua jenis pekerjaan tersebut.

Kedua, terjadinya ***subordinasi*** pada salah satu jenis *sex* yang umumnya pada kaum perempuan. Dalam rumah tangga, masyarakat, maupun negara, banyak kebijakan dibuat tanpa menganggap penting kaum perempuan. Anggapan karena perempuan toh nantinya akan ke dapur, mengapa harus sekolah tinggi-tinggi, adalah bentuk subordinasi yang dimaksudkan. Bentuk dan mekanisme dari proses

subordinasi tersebut dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat berbeda. Anggapan bahwa perempuan itu 'emosional' maka dia tidak tepat untuk memimpin partai atau menjadi manager, adalah proses subordinasi dan diskriminasi yang disebabkan oleh *gender*. Selama berabad-abad, atas alasan agama, kaum perempuan tidak boleh memimpin apapun, termasuk masalah keduniawian, tidak dipercaya untuk memberikan kesaksian, bahkan tidak mendapatkan warisan. Timbulnya penafsiran agama yang mengakibatkan subordinasi dan marginalisasi kaum perempuan itulah yang dipersoalkan.

Ketiga adalah *pelabelan negatif (stereotype)* terhadap jenis kelamin tertentu, terutama terhadap kaum perempuan. Akibat dari stereotype itu adalah terjadinya diskriminasi serta berbagai ketidakadilan lainnya. Dalam masyarakat banyak sekali stereotip yang dilabelkan pada kaum perempuan dan berakibat membatasi, menyulitkan, memiskinkan, dan merugikan kaum perempuan. Adanya keyakinan masyarakat bahwa lelaki adalah pencari nafkah (*breadwinner*) misalnya, menyebabkan setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh perempuan dinilai hanya sebagai tambahan sehingga boleh dibayar rendah. Itulah maknanya dalam satu keluarga, sopir (dianggap sebagai pekerjaan lelaki) sering dibayar lebih tinggi dibanding pembantu rumah tangga (peran

gender perempuan) meski-pun tidak ada yang menjamin bahwa pekerjaan sopir lebih berat dan lebih sulit dibanding memasak dan mencuci.

Keempat, *kekerasan (violence)* terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan karena perbedaan *gender*. Kekerasan di sini mulai dari kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemu-kulan, sampai kekerasan dalam bentuk yang lebih halus seperti pelecehan (*sexual harassment*) dan penciptaan ketergantungan. Banyak sekali kekerasan terjadi pada perempuan yang ditimbulkan oleh adanya *stereotype gender*. Perbedaan *gender* dan sosialisasi *gender* yang amat lama, mengakibatkan kaum perempuan secara fisik lemah dan kaum lelaki umumnya lebih kuat. Hal itu tidak menimbulkan masalah sepanjang anggapan lemahnya perempuan tersebut tidak mendorong dan memperbolehkan lelaki untuk bisa seenaknya memukul dan memper-kosa perempuan. Banyak terjadi pemerkosaan justru bukan karena unsur kecantikan, melainkan karena kekuasaan dan *stereotype gender* yang dilabelkan pada kaum perempuan.

Kelima, karena peran *gender* perempuan adalah mengelola rumah tangga maka banyak perempuan menanggung *beban kerja* domestik lebih banyak dan lebih lama (*burden*). Dengan kata lain 'peran

BAHASAN UTAMA

gender' perempuan yang menjaga dan memelihara kerapian tersebut telah mengakibatkan tumbuhnya tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa mereka harus bertanggung jawab atas terlak-sananya keseluruhan pekerjaan domestik. Sosialisasi peran *gender* tersebut menjadikan rasa bersalah bagi perempuan jika tidak melakukannya. Sementara bagi kaum lelaki, tidak saja merasa bukan tanggung jawabnya, bahkan banyak tradisi yang melarang secara adat untuk berpartisipasi. Beban kerja tersebut menjadi dua kali lipat bagi kaum perempuan yang juga bekerja di luar rumah. Selain bekerja di luar rumah mereka juga masih harus bertanggung jawab untuk keseluruhan pekerjaan domestik. Namun bagi mereka yang secara ekonomi cukup, pekerjaan domestik ini kemudian dilimpahkan ke pihak lain, yakni pembantu rumah tangga. Pada akhirnya, pindahlah marginalisasi, subordinasi, dan beban kerja (*burden*) ini dari istri ke para pembantu rumah tangga yang menimbulkan banyak masalah.

Semua manifestasi ketidakadilan *gender* di atas saling berkait dan secara dialektika saling mempengaruhi. Manifestasi ketidakadilan itu tersosialisasi, baik kepada kaum lelaki maupun perempuan, secara mantap dan lambat laun mengakibatkan lelaki maupun perempuan menjadi terbiasa dan akhirnya percaya bahwa peran *gender* itu

(seolah-olah) merupakan kodrat. Lambat laun terciptalah suatu struktur dan sistem ketidakadilan *gender* yang 'dapat diterima' dan tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang salah. Persoalan ini bercampur dengan kepentingan kelas. Itulah sebabnya mengapa justru banyak kaum perempuan kelas menengah yang sangat terpelajar, ingin memper-tahankan sistem dan struktur tersebut.

Analisis *gender* di atas memberi perangkat teoritis untuk memahami sistem ketidakadilan *gender*. Kedua jenis kelamin, baik lelaki maupun perempuan, bisa menjadi korban dari ketidakadilan *gender* tersebut. Namun karena mayoritas yang menjadi korban ketidakadilan *gender* adalah perempuan maka seolah-olah analisis *gender* hanya menjadi alat perjuangan kaum perempuan. Analisis *gender* selanjutnya justru menjadi alat gerakan feminisme untuk menjelaskan sistem ketidakadilan sosial. Tanpa analisis *gender* gerakan feminisme akan menjadi reduksionisme dan lebih memusatkan perhatian pada perubahan sosial bagi kaum perempuan belaka. Analisis *gender* membantu memahami bahwa pokok persoalannya adalah sistem dan struktur yang tidak adil, di mana baik lelaki maupun perempuan menjadi korban dan mengalami dehumanisasi karena sistem ketidakadilan *gender* tersebut. Kaum perempuan mengalami dehumanisasi

karena ketidakadilan *gender* sementara kaum lelaki mengalami dehumanisasi karena melanggengkan penindasan *gen-der*.

Lebih lanjut, dengan analisis *gender* ini memungkinkan gerakan feminisme memfokuskan relasi (struktur *gender*), serta keluar dari pemikiran yang memfokuskan 'perempuan'. Dengan demikian, yang menjadi agenda utama setiap usaha perubahan sosial tidak sekedar menjawab 'kebutuhan praktis' atau mengubah kondisi kaum perempuan, melainkan juga menjawab kebutuhan strategis kaum perempuan, yakni memperjuangkan perubahan posisi kaum perempuan, termasuk konter hegemoni dan konter *discourse* terhadap ideologi *gender* yang telah mengakar dalam keyakinan kaum perempuan maupun lelaki. Usaha (*empowerment*) dan perubahan struktur *gender* inilah yang dikenal dengan pendekatan *Gender and Development* (GAD).

Julia Mosse (1994) mempertajam perbedaan pandangan antara *Women In Development* yang terfokus pada perempuan dan *Gender And Development* yang berdasar pada analisis *gender*. Uraianya merupakan saksi atas pergeseran paradigma dari 'proyek perempuan' menuju paradigma '*gender and development*'. Bahkan ia menambahkan bahwa kaum perempuan tidak hanya menderita akibat diskriminasi *gender*, namun

juga menderita akibat warisan dari penindasan kelas, kasta, dan suku. Dengan kata lain, kaum perempuan menderita tidak hanya karena peran *gender*-nya, melainkan juga karena relasi kelas, warna kulit, kasta, serta asal daerah sukunya. Penindasan berlapis tersebut telah dimulai sejak jaman kolonialisme dan tetap dilanjutkan pada jaman pascakolonialisme yakni jaman pembangunan.

Pembangunan ternyata berdampak berbeda terhadap lelaki dan perempuan karena adanya keyakinan *gender*, baik pada organisasi pelaksana pembangunan maupun pada masyarakat. Atas dasar itulah dapat disimpulkan bahwa 'analisis' *gender* menjadi sangat strategis bukan saja bagi kaum feminis untuk memperjuangkan nasib kaum perempuan, melainkan juga sangat diperlukan bagi setiap usaha untuk melakukan perubahan sosial. ♦

Bahan Kepustakaan

- Aguilar, D.D.
1988. *The Feminist Challenge*.
Manila: The Asian Social
Institute.
- Andersen, M.L.
1983. *Thinking About Women,
Sociological and
Feminist Perspective*.
New York: MacMillan
Pub. Co. Inc.

BAHASAN UTAMA

- Bhasin, Kamla and Nighat S. Khan.
1986. *Some Question on Feminism and Its Relevance in South Asia*. New Delhi: Kali For Women.
- Boserup, E.
1970. *Women's Role in Economic Development*. London: George Allen and Unwin.
- Boulding, Elisa.
1974. *Women in The Twentieth Century World*. New York: Halsted Press.
- Charlton, S. Ellen.
1984. *Women In Development*. Boulder, Colorado: West View Press, Inc.
- Cott, Nancy F.
1987. *The Grounding of Modern Feminism*, New Haven and London: Yale University Press.
- Davis, M (ed.).
1983. *Third World, Second Sex: Women's Struggle and National Liberation*. London: Zed Press.
- Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN).
1986. "Development Crisis and Alternatives visions: Third World Women Perspectives" dalam *Canadian Women Studies*. V. 7.
- Davis, Kathy.
1986. *The Gender of Power*. Leiden: Leiden University Press.
- Engels, F.
1970. *The Origin of Family Private Property and the State*. New York: International Publisher Company.
- Eviota, Uy Elizabeth.
1992. *The Political Economy of Gender*. London: Zed Books Ltd.
- Fakih, Mansour.
1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firestone, S.
1970. *The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution*. New York: William Morrow and co. Inc.
- Folbre, Nancy.
1986. "Cleaning House: New Perspectives on Household and Economic Development" dalam

-
- Journal of Development Economics* 22, North Holland.
- Harding, S,
1986. *The Science Question in Feminism*. Ithaca: Cornell University Press.
- Jaggar,
1977. "A. Political Philosophies of Women's Liberation" in Weterling - Braggin, (M. ed.,) *Feminism and Philosophy*. Wesley Hartforth: Kumarian Press.
-
1983. *Feminist Politics and Human Nature*. Brighton: Harvester Press.
- Maguire, Pat.
1987. *Doing Participatory Research: A Feminist Approach*. Amherst: Center For International Education, University of Massachusetts.
-
1984. *Women In Development: An Alternatives Analysis*. Amherst: Center For International Education, University of Massachusetts.
- Mbiblinyi, Marjorie.
1984. *Research Priorities in Women's Studies in Eastern Africa*. Women's Studies International Forum, 7 (4), 289-300.
- Merinisi, F dan Riffat Hasan.
1995. *Setara Dihadapan Allah*. Yogyakarta: LSPPA - Yayasan Prakarsa,
- Mies, Maria.
1989. *Patriarchy and Accumulation on A World Scale: Women In the International Division of Labor*. London: Zed Books Ltd.
- Mitchell, J dan Ann Oakley,
1985. *What Is Feminism*. Bringhamton, New York: Yale University Press. Bringhamton. New York.
- Mosse, Julia Cleves.
1992. *Half the World, Half A Change: An Introduction to Gender and Development*. Oxford: Oxfam.
- Mueller, A.
1987. *Peasant and Proffesionals: The Production of Knowledge about The Third World*. A paper presented to the Meeting of the

BAHASAN UTAMA

- Assosiation for Women in
Develop-ment,
Washington DC. April.
- Nicholson, L .(ed.).
1990. *Feminism/Postmo-
dernism*. New York:
Routledge .
- NG. Cecilia and Carol Yong.
t.t. "Malaysian Women at
The Crossroad". dalam
*Change International
Report*. no 17, London.
- O' Connell, H. (ed.)
1994. *Women and Conflict*.
Oxford: Oxfam.
- Reardon, G.
1994. *Women and Environment*.
Oxford: Oxfam.
- Robert, Helen. (ed.).
1981. *Doing Feminist Research*.
London: Routledge and
Kegan Paul.
- Rogers, Barbara.
1979. *The Domestication of
Women: Discrimination
in Developing Society*.
New York: St. Martin
Press.
- Sacks, K.
1979. *Sister and Wives: The
Past and The Future of
Sexual Inequality*.
- Westport CT: Greenwood
Press.
- 1975. "Engels Revisited:
Women The Organisation
of Production and
Private Property" in
Reiter (ed.). *Toward an
Anthropology of Women*.
New York: Monthly
Review.
- Sachs, Wofgang (ed .).
1989. *The Development
Dictionary, A Guide to
Knowledge As Power*".
London: Zed Books.
- Shiva, Vandana.
1986. "Ecology Movement in
India" dalam
Alternatives, Vol 11, no
2.
- 1989. *Staying Alive*. London:
Zed Book.
- Stamp. P.
1989. *Tecnology, Gender And
Power in Africa*. Ottawa:
IDRC.

Sweetman, C. dan Kate De
Selincourt.

1994. *Population and
Reproductive Right.*
Oxford: Oxfam.

Tong, Rosemaries.

1989. *Feminist Thought.*
Boulder and San
Fransisco: West View
Press.

Wallace, Tina and Candida March.

1991. *Changing Perception:
Writing on Gender and
Development.* Oxford:
Oxfam.

Walker, B. (ed.).

1994. *Women and Emergencies.*
Oxford: Oxfam.

William, S. dan Janet Seed dan
Adelina Mwau,

1994. *The Oxfam Gender
Training Manual.*
Oxford: Oxfam
Publication.

PENELITIAN BERPERSPEKTIF *GENDER*

Dr. Hesti R. Wijaya

♦ **Pendahuluan**

Dari berbagai definisi yang ada, pada prinsipnya *gender* adalah peran yang dikonstruksi secara sosial bagi perempuan yang dibedakan dengan lelaki terutama oleh asosiasi peran biologis perempuan dengan fungsi reproduksinya. Aki-batnya, terjadi hubungan asimetri antara perempuan dan lelaki. Kaum perempuan menjadi golongan yang mengalami berbagai ketidakberuntungan di lingkup domestik yang meluas ke dunia publik. Dalam berbagai bentuknya, kaum perempuan masih mengalami subordinasi, perendahan, pengabaian, eksploitasi, pelecehan seksual, tindak kekerasan, dan lain-lain. Persistensi hal sedemikian telah terjadi (Tinker, 1991). Taruhlah di Indonesia, hal tersebut terjadi sekitar seabad lamanya sejak Kartini berusaha membebaskan perempuan dari keterbelakangannya. Namun dalam masa Pembangunan Jangka Panjang II ini, peningkatan peran dan kedudukan perempuan masih menjadi area garapan pembangunan.

Dewasa ini, diyakini baik oleh ilmuwan yang peduli masalah

gender, aktivis, praktisi maupun birokrat bahwa bila masalah ketimpangan *gender* diatasi maka kedudukan perempuan akan meningkat menjadi sejawat yang setara, sejajar dengan pria.

Penelitian berorientasi *gender* adalah penelitian/riset aksi yang merepresentasikan realitas perempuan, mengangkat prioritas kebutuhan perempuan, dan mengubah situasi untuk mewujudkan kesetaraan *gender*. Penelitian dengan pendekatan *gender* termasuk relatif baru. Bagi ilmuwan atau akademisi, dasar keilmuan yang paling tepat adalah ilmu baru bernama Studi Wanita (*Women Studies*) yang dikenal pula dengan *Gender Studies* atau *Feminist Studies*. Secara internasional keberadaan disiplin ilmu oleh sebagian kecil ilmuwan sejak tahun 70-an berkembang pesat. Obyek kajiannya semakin transparan. Dunia pendidikan tinggi membuka program gelar dan nongelar Studi Wanita, Studi Wanita diintegrasikan ke dalam kurikulum (Schmits, 1985). Di Indonesia sendiri, keberadaannya sebagai sains belum banyak dikenal dan nama keilmuannya belum baku. Yang

paling populer adalah Studi Wanita, sebagian kecil menyebut-nya Kajian Perempuan, dan ada pula yang menyebut Studi Perempuan.

Dunia ilmu pengetahuan yang bersifat androsentri tidak memperhitungkan perempuan dalam teori dan metodologi, karena itu, cara-cara baru perlu ditempuh. Sebagaimana dikatakan Reinharz (1983), metode dan metodologi harus dimengerti dalam hubungannya dengan berbagai konteks seperti sejarah, budaya, sosial, ideologi, bukan sekedar teknik maupun rasional untuk melakukan penelitian. Demikian pula halnya dengan keilmuan Studi Wanita. Dalam keilmuan Studi Wanita, metodologi penelitian bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang terbebas dari karakteristik ketidakberuntungan dalam berbagai bentuk. Banyak hal tidak diketahui tentang perempuan. Selama ini mereka sering 'tidak tampak' (*invisible*) di mata banyak pihak, termasuk ilmuwan dan politisi serta birokrat, antara lain akibat kurangnya penelitian yang mampu mengangkat mereka ke permukaan. Untuk itu metodologi penelitian harus berdaya mengungkap ketersembunyian mereka. Penelitian membutuhkan metodologi yang dapat menjawab dengan jelas segala pertanyaan mengenai apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan segudang pertanyaan lain. Hanya dengan penguraian yang jelas sajalah

langkah-langkah tepat bagi perbaikan nasib perempuan bisa dilakukan.

Kebaruan ilmu sebagai dasar penelitian yang dibarengi kebaruan metodologi penelitian masih memerlukan beberapa syarat lain. Bagi penelitian yang berorientasi *gender*, tentu saja isu *gender* harus menjadi fokus penelitian. Untuk itu dibutuhkan kesadaran dan kepekaan *gender* dari peneliti. Namun, dalam situasi dunia androsentri di mana *gender* telah diinternalisasi, penyadaran dan pengembangan sensitivitas pada isu *gender* tidaklah mudah.

♦ Latar Belakang Metodologi Penelitian Studi Wanita

Mies (1983) menyebutkan bahwa androsentri atau bias lelaki terjadi di hampir semua teori berbagai disiplin ilmu. Adalah dilematis bila paradigma, konsep, teori, cara mengkaji kenyataan dan kesediaan untuk menerima bukti-bukti empiris dari bidang keilmuan yang sudah berkembang dibentuk hanya oleh satu dimensi jenis kelamin saja, yaitu lelaki. Hasilnya otomatis berbias lelaki (Eichler, 1988), sehingga kontribusi, kondisi, kehidupan, pekerjaan maupun perjuangan kaum perempuan tak banyak didokumentasi. Hal ini tidak hanya berarti bahwa berbagai aspek pengetahuan dan kehidupan tentang

BAHASAN UTAMA

perempuan berada dalam kegelapan, namun intelektualitas pemahamannya terbatas pada dunia lelaki.

Agar metodologi penelitian ilmiah Studi Wanita dikuasai, badan ilmu pengetahuan Studi Wanita juga harus dimiliki oleh peneliti. Bagi peneliti yang berfokus *gender*, kepekaan peneliti terhadap masalah *gender* harus tinggi, sehingga metodologi penelitian yang tidak bias lelaki atau nonseksis (Eichler, 1988) bisa dijalankan dengan baik. Persyaratan ini berbeda dengan positivis, misalnya dalam dikotomi subyek dan obyek. Aliran positivis berpendapat bahwa peneliti adalah subyek dan apa yang diteliti adalah obyek. Sebagai subyek, si peneliti menempatkan diri pada posisi lebih tahu, lebih pandai, lebih obyektif dibanding si obyek. Konon si obyek dipandang dari obyektifitas yang meyakinkan dan tidak memihak, sehingga generalisasi dapat dilakukan dengan baik. Orientasi pada pengalaman pribadi negatif dan/ atau tidak ada sama sekali, karena dianggap mempunyai subjektivitas tinggi. Tingginya subjektivitas dipercayai tidak memungkinkan dihasilkannya generalisasi yang baik. Prinsip sedemikian itu berada pada kutub yang bertentangan dengan prinsip penelitian bidang keilmuan Studi Wanita.

Secara epistemologis, metodologi penelitian bidang keilmuan Studi Wanita berdasarkan paradigma baru. Paradigma ini mengubah dan mengembangkan sumber daya manusia perempuan yang terbebas dari berbagai macam ketidakberuntungan seperti keteringgalan, keterbelakangan, subordinasi, eksploitasi, serta perlakuan yang tak memandang perempuan sebagai zat biologis yang berharkat dan bermartabat sederajat dengan manusia berkelamin lelaki. Paradigma ini dilandasi oleh berbagai keadaan empiris yang dialami, dirasakan, dan disadari oleh perempuan itu sendiri, secara relatif dihubungkan dengan keberadaan lelaki baik secara nyata maupun tersembunyi. Keadaan yang banyak terjadi adalah ketidaksetaraan laki-perempuan (*inequality; inequity*), perendahan (*sub-ordination*) status perempuan, ketidaktampakan peran (*invisibility*), bias lelaki (*male bias*), diskriminasi, eksploitasi, pelecehan, perdagangan perempuan (*trafficking women*), kurangnya posisi tawar-menawar, kurangnya akses pengambilan keputusan politik, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan belum peka *gender* (untuk Indonesia baca misalnya Wijaya, 1993 dan 1994; serta Wijaya et al. 1995), keterbatasan kesempatan aktualisasi diri, tindak kekerasan (*violence against women*) dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia pada perempuan lainnya. Pengakuan hak

asasi perempuan sama dengan hak asasi manusia baru terjadi tahun 1993 (*Vienna Declaration of Human Rights*).

Latar belakang epistemologis Studi Wanita cukup unik, berkaitan erat dengan ideologi *gender*. Perspektif *gender* ini mendasar, karena masalah yang dihadapi perempuan bukanlah berakar pada konflik-konflik politik lingkup publik, melainkan lebih berasal dari hubungan “pribadi” lelaki dan perempuan yang terikat dalam hubungan pasangan hidup ataupun keluarga.

♦ **Penelitian tak Berperspektif Gender: Metodologi yang Konvensional**

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan berperspektif *gender* bila tak mempedulikan laki-perempuan serta hubungan-hubungan *gender* di antara keduanya. Penelitian yang konvensional mengandung kelemahan, yang tak akan bermakna bagi perubahan nasib perempuan. Bahkan peneliti tidak berkehendak untuk mengubah situasi perempuan. Pada penelitian konvensional, isu *gender* tidak menjadi perhatian. Kadang-kadang statistik berdasar jenis kelamin dan situasi antara dua jenis kelamin dimunculkan, namun praktis tak dilakukan. Hasil penelitian tak lebih sebagai penghias rak buku. Beberapa butir lain yang

dianggap penting dalam penelitian konvensional adalah:

Metode Kuantitatif

Metode kuantitatif yang bagi kebanyakan metodologi penelitian konvensional merupakan keharusan, tidak terbebas dari bias androsentri, yaitu semacam pemusatan pada dunia lelaki (Mies, 1983). Biasanya beranjak dari teori yang sudah lahir, dibuatlah hipotesa atau ramalan-ramalan. Metode ini tidaklah tepat bila diterapkan pada penelitian yang bertujuan mengubah ketidak-beruntungan perempuan yang teorinya baru berkembang. Ketidacukupan metode ini (Jayaratne, 1983; Reinharz, 1983; Duelli Klein, 1983), karena:

- banyak penelitian ilmu-ilmu sosial dipakai untuk mendukung nilai-nilai seksis dan elitis, namun sangat sedikit yang secara empiris telah terbukti mengubah nasib perempuan;
- penelitian sosial yang dihasilkan tak banyak digunakan, sehingga tak mempunyai dampak untuk mengatasi problema sosial yang dihadapi perempuan;
- ada hubungan eksploitatif peneliti - responden, di mana responden adalah obyek bagi kepentingan peneliti;
- standar metodologi kadang-kadang dilanggar untuk memenuhi target waktu, dana, kurangnya kemampuan mene-

liti, dan sekedar bahan untuk publikasi;

- dangkal, tak mampu mengungkapkan dengan mendalam pengertian/perasaan yang diteliti, serta menjelaskan masalah secara aktual, bukan oleh spekulasi peneliti.

Kritik ini tidak berarti bahwa data kuantitatif sama sekali tidak dibutuhkan. Sebagai informasi, profil latar belakang dan kemampuan metode ini mengadakan generalisasi, masih selalu dibutuhkan. Kegunaannya juga besar untuk mengevaluasi akurasi teori yang sudah dihasilkan. Namun demikian, seperti yang diingatkan oleh Jayaratne (1983), penyesuaian sejalan dengan paradigma baru tak boleh dilupakan.

Duplikasi Penelitian Konvensional Pada Jenis Perempuan

Banyak kecenderungan penelitian berupa duplikasi dari topik penelitian yang sama dengan yang diterapkan pada lelaki secara konvensional. Duelli Klein (1983) mengungkapkan bahwa duplikasi semacam ini, besar kemungkinan hanya menghasilkan tambahan penjelasan tentang perempuan berdasar pengetahuan tentang lelaki. Bisa pula sekedar evaluasi jawaban dari situasi perempuan berdasarkan standar lelaki yang berarti melanggengkan perspektif androsentri dan melestarikan ideologi *gender*.

Keterbatasan Dikotomi Lelaki Dan Perempuan

Pada studi yang berorientasi dikotomi lelaki dan perempuan, perbedaan, rata-rata, dan kecenderungan umumnya diukur dengan standar lelaki. Adapun hubungan-hubungan, kesamaan, interaksi antara keduanya, lebih-lebih akar penyebabnya tidak mendapat perhatian.

♦ Spesifikasi Penelitian Berperspektif *Gender*

Berbeda dengan yang konvensional, metodologi penelitian Studi Perempuan pada umumnya dan penelitian berperspektif *gender* pada khususnya merupakan riset aksi partisipatori “untuk” perempuan (bukan penelitian “tentang” perempuan). Penelitian ‘untuk’ perempuan, yaitu: “penelitian yang mencakup kebutuhan, minat, dan pengalaman perempuan, sebagai instrumen yang ditujukan untuk meningkatkan status kehidupan atau kesejahteraan hidupnya” (Duelli Klein, 1983 terjemahan).

Dengan pendekatan *gender*, perbaikan hubungan lelaki-perempuan agar lebih simetri menjadi sasaran penelitian. Jadi, hasil penelitian bukan ditujukan untuk menghasilkan buku koleksi perpustakaan atau

bahan publikasi saja. Hanya melalui penelitian aksi untuk perempuanlah akan dapat dimunculkan validitas, model, teori, dan peluang bagi modifikasi (Klein, 1983; Mies, 1983; Wijaya, 1992). Untuk itu dibutuhkan perubahan seperti berikut ini:

1. Perubahan obyek menjadi subyek penelitian

Filosofi penelitian berubah, peneliti tidak lagi menempatkan dirinya sebagai subjek dan perempuan yang diteliti sebagai objek, agar hasil penelitian objektif. Sebaliknya si peneliti perlu mengubah objek menjadi subjek, yang bersama-sama dengan peneliti mengubah nasibnya. Peneliti harus belajar meneliti bersama kaum perempuan yang diteliti, tidak secara sepihak mengeksploitir responden dengan pertanyaan yang disusunnya sendiri.

2. Penggunaan paradigma baru sebagai dasar

Paradigma perlu di pahami dan diyakini oleh peneliti, agar formulasi masalah, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, metodologi yang dipakai, analisis, maupun intervensi dapat dirumuskan dengan tepat. Pada tahun delapan puluhan, sebagian ahli (misalnya Coyner, 1983), menyatakan bahwa paradigma masih berada dalam tahapan pra-paradigma.

3. Topik penelitian

Secara singkat dapat dikatakan bahwa pada saat ini masih terbuka

lebar topik-topik berarti untuk diteliti, khususnya yang berkaitan dengan ketimpangan *gender* dan rendahnya status perempuan dibandingkan dengan lelaki. Topik penelitian harus berawal dari isu aktual yang ditemukan di lapangan. Hal ini sejalan dengan ciri penelitian bidang keilmuan Studi Wanita yang berupa *Grounded Research* (penelitian bersumber dari masalah yang betul-betul terjadi di lapangan). Formulasi masalah kadang dikembangkan melalui pendekatan serta kerja sama secara partisipatori antara peneliti dan yang diteliti, sehingga kepentingan keduanya terpenuhi. Suatu penelitian dasar sering kali amat penting untuk memformulasi masalah dengan tepat dari persoalan yang terjadi di lapangan.

4. Alur penelitian dari bawah ke atas

Penelitian yang berawal dari ting-kat komunitas, baik sejak formulasi topik dan keseluruhan metodologinya maupun penggunaannya secara luas di masyarakat. Pada riset aksi misalnya, perencanaan disusun dari bawah bersama komunitas. Demikian pula di tingkat yang lebih luas, proyek dan program pembangunan bagi perempuan perlu disusun dari bawah. Idealnya, pelajaran dari penelitian aksi perlu diangkat ke atas bagi keperluan pembangunan.

5. Pendekatan kualitatif

Bertolak-belakang dengan penelitian kuantitatif yang bebas nilai, penelitian Studi Perempuan tidak bebas nilai. Penelitian ini lebih mementingkan interes seseorang atau pribadi peneliti dan nilai-nilai tertentu, dengan catatan hal tersebut diungkapkan sebagai pembatas.

Pendekatan kualitatif juga memberi kemungkinan besar pada peneliti untuk mengadakan kegiatan aksi langsung di tingkat makro dan mikro. Di tingkat makro, penelitian dapat berorientasi pada kebijaksanaan pemerintah yang peduli perempuan. Di tingkat mikro, kegiatan aksi bisa dilaksanakan langsung pada kalangan perempuan dimaksud, guna melepaskan mereka dari keteringgalan ataupun ketertinggalan. Lebih lanjut lagi, penelitian kualitatif akomodatif terhadap para peneliti dan responden yang diteliti untuk bekerjasama, saling menghormati, saling berinteraksi, saling bergantung, dan saling membantu. Pendekatan kualitatif juga lebih bisa menjelaskan, memberikan pengertian, serta menggali penyebab, alasan-alasan, hingga ke akar-akarnya.

Jelas metode penelitian kualitatif dipakai dalam meneliti sejarah kasus, studi diskriptif, taksonomi situasi. Metode yang sekarang banyak dikembangkan adalah observasi partisipasi. Dapat disebutkan bahwa metode partisipatori

dengan cara berdiskusi dengan orang-orang yang diteliti dan mengajak mereka “meneliti” bersama-sama peneliti tentang isu perempuan yang terjadi pada mereka adalah cara yang tepat untuk menggali, menganalisis, dan selanjutnya menyetengahkan data kualitatif yang bermutu.

6. Penempatan pengalaman pribadi sebagai suatu material

Hubungan antarsubyek, yaitu antara peneliti dan yang diteliti serta kesadaran subjektif di mana pengalaman pribadi dari seorang peneliti yang juga perempuan dihubungkan dengan perempuan lain sebagai individu yang diteliti, sangat bermanfaat dalam menelaah problema kaum perempuan. Misalnya perlakuan *gender* yang diterima, diinternalisasi dalam hidupnya. Dengan saling berbagi cerita, masalah, pengalaman, atau apapun data yang ingin digali, akan timbul interaksi di antara keduanya. Jawabannya perlu direkam secara interaktif pula. Untuk mempertahankan dan mencari kebenaran data, menghadapi kemungkinan data yang tidak dikemukakan dengan jujur, tidaklah dengan membuangnya, namun menanggapinya secara kritis dan hati-hati.

Hubungan antara peneliti dan yang diteliti hendaknya bukan hubungan sesaat pada saat penggalan data saja, akan tetapi secara manusiawi merupakan hubungan berlanjut yang

bisa berkembang sebagai proses penelitian seumur hidup.

Oleh karena karakteristik penelitian Studi Wanita yang semacam itu, banyak pakar Studi Wanita yang menyatakan bahwa peneliti Studi Wanita selayaknya berjenis kelamin perempuan. Pendapat ini ditunjang oleh kekhawatiran akan adanya hasil penelitian Studi Wanita yang bias lelaki, bila dilakukan oleh peneliti lelaki.

7. Jenis data yang dikumpulkan

Pada prinsipnya data yang dikumpulkan adalah :

- variabel berkaitan dengan lelaki dan perempuan;
- berbagai hubungan oleh peran lelaki dan perempuan;
- akar penyebab perbedaan antara lelaki dan perempuan;
- keberdayaan lelaki dibanding perempuan; dan
- kebutuhan perempuan baik kebutuhan praktis maupun strategis.

Variabel *gender* bisa digali dari sumber-sumber:

- sekunder: Statistik *Gender*; dan
- primer.

Data primer umumnya dikembangkan dari komponen analisis gender. Analisis *gender* yang paling populer adalah dari Harvard (Moser, 1985) yang mencakup:

1. data kegiatan yang dilakukan lelaki dan perempuan (lelaki

melakukan apa? Perempuan melakukan kegiatan apa?);

2. data tentang akses perempuan - versus akses lelaki terhadap sumber daya (perempuan mempunyai/bisa memperoleh sumber daya apa? lelaki memperoleh apa?);
3. data kontrol perempuan versus lelaki terhadap sumber daya (perempuan pengambil keputusan penggunaan sumber daya apa? lelaki penentu sumber daya apa?);
4. data jenis manfaat yang diperoleh (perempuan menikmati apa? Lelaki menikmati apa saja?).

8. Pengumpulan data

Pengumpulan data bergantung pada situasinya. Data harus dikumpulkan dalam setting yang wajar mungkin. Tak kalah penting sesudah data terkumpul adalah interpretasi data primer yang dikemukakan orang yang diteliti. Instrumen semacam daftar pertanyaan formal menjadi tidak tepat. Dalam analisis data, data harus diolah secara reflektif terutama oleh peneliti yang terlibat langsung dalam pengumpulan data bersama responden yang diteliti. Data yang sudah dikumpulkan kemudian di kompilasi dan diperiksa. Apabila belum mencukupi, data ditambah dengan terjun kembali ke lapangan sesuai kebutuhan. Penambahan data masih bisa dilakukan ketika kekurangan data diidentifikasi

BAHASAN UTAMA

semasa analisis ataupun penulisan laporan. Hal ini dimungkinkan, terutama bila datanya adalah data kualitatif.

Data bisa dikumpulkan melalui survey, wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus. Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA - penilaian pedesaan berpar-tisipasi) adalah metode yang efektif, tidak saja untuk menyadarkan mereka yang terlibat dalam penelitian terhadap masalah *gender*, tetapi juga untuk mengidentifikasi kebutuhan. Strategi sering perlu dikembangkan bagi pengumpulan data, misalkan pada suatu studi mendalam yang ber-strategi:

- menempatkan perempuan yang diteliti sebagai subyek (Mies, 1983; Reinharz, 1983; Stanley & Wise, 1983);
- memilih dengan tepat periode pengumpulan data, khususnya penggalan data alokasi waktu;
- menempatkan riwayat hidup sebagai sumber data;
- menyadari dan mendokumentasi bias dari si peneliti; dan
- adanya kesadaran yang tinggi bahwa metodologi yang dipakai tidak bias lelaki atau seksis.

9. Analisis

Dalam analisis, data diolah secara reflektif oleh peneliti. Bagi peneliti pemula yang belum sensitif *gender*, interaksi dengan peneliti senior akan bermanfaat. Akibat internalisasi dan praktek *gender* yang mengakar kuat

dalam kehidupan sehari-hari, keyakinan kebanyakan orang bahwa ketimpangan *gender* (*gender inequality*) adalah hal yang alamiah dan bukan sebagai akibat kondisi sosial (Delphy & Leonard, 1986) perlu mendapatkan porsi analisis yang tajam. Analisis *gender* adalah analisis yang paling populer saat ini.

Analisis *gender* mengalami berbagai perkembangan:

1. Overholt et al. (1986) mengintroduksi kerangka analisis:
 - profil kegiatan;
 - profil akses dan kontrol;
 - analisis faktor yang mempengaruhi kegiatan; dan
 - analisis siklus proyek.

Analisis yang terkenal dengan nama metode Harvard ini ternyata mempunyai kelemahan, yaitu orientasi yang kuat pada proyek, tidak peka terhadap dinamika komunitas sehari-hari maupun nilai budaya. Sementara itu pengalaman kehidupan perempuan amat disederhanakan melalui penempatan perempuan yang terpisah dari lelaki dan mengabaikan kompleksitas peran perempuan, status, relativitas budaya, dan hubungan dengan lelaki.

2. Dalam konferensi tentang Pelatihan *Gender* dan Perencanaan Pembangunan, disepakati bahwa versi yang umum dari

kerangka analisis *gender*, baik di tingkat individu di komunitas maupun lembaga di mana intervensi untuk kesetaraan *gender*, dilakukan dengan mengajukan pertanyaan (Rao et.al., 1991):

- Siapa melakukan apa? (Pembagian kerja seksual)
 - Siapa memiliki apa? (Akses dan kontrol sumber daya)
 - Faktor apa yang mempengaruhi pengaturan *gender* tersebut? (Faktor yang mempengaruhi dan yang mungkin dipergunakan mengubah hubungan *gender*)
 - Bagaimana sumber daya publik didistribusikan dan siapa mendapat apa? (Lembaga yang dipergunakan, keadilan distribusi, efisiensi, bagaimana membuatnya responsif pada perempuan sama halnya dengan pada lelaki?)
3. Bagi sektor pertanian, dalam situasi coba-coba maupun pengalaman pribadi, analisis *gender* dilakukan dari yang paling sederhana, misalnya terbatas pada analisis kegiatan dan alokasi waktu, hingga yang paling lengkap dengan melaksanakan intervensi dalam riset aksi (Feldstein & Jiggins, 1994). Dalam pada itu Feldstein et.al. (1989) menyebutkan analisis *gender* sebagai alat

diawali dengan sederet pertanyaan:

- Siapa melakukan apa?
- Apakah barang dan jasa yang dihasilkan dan siapa menghasilkan apa?
- Sumber daya apa yang tersedia, siapa yang mempunyai akses terhadapnya, serta siapa yang mengontrol?
- Siapa mendapat manfaat apa?

4. Pendekatan kebutuhan (Moser 1993), yaitu :

- kebutuhan praktis, yang mengacu pada peran *gender* perempuan dewasa ini; dan
- kebutuhan strategis perempuan, yang mengacu pada kehidupan ideal perempuan yang mempunyai kesetaraan *gender* dengan lelaki.

Pendekatan kebutuhan ini penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berorientasi *gender*.

10. Kualitas peneliti

Secara umum, ada tuntutan kualitas peneliti, meskipun tanpa standar keras sebagaimana dalam penelitian konvensional. Di masa kini, ada etos pemberian peluang bagi peneliti untuk belajar dalam proses penelitian, namun ada tuntutan:

BAHASAN UTAMA

- Peneliti mempunyai dedikasi dan komitmen.
- Mampu mengidentifikasi isu *gender*.
- Harus terlibat.
- Para peneliti perlu memberi perhatian dan simpati pada masalah *gender* orang-orang yang diteliti.
- Memiliki kepekaan *gender* (*gender sensitiveness*).

Kepekaan *gender* tidak terbentuk dengan sendirinya. Oleh karena itu, sebaiknya peneliti:

- Mempunyai kesadaran terhadap adanya masalah *gender*.
- Berpengalaman mengatasi masalah ketidaksetaraan *gender*, baik pribadi maupun di masyarakat.
- Mengalami pengasahan berbasis ekspose terhadap berbagai kasus *gender*.
- Ada pemihakan terhadap perempuan bernasib malang.
- Ada praksis membebaskan perempuan dari kemalangan-nya akibat hubungan *gender* lelaki - perempuan yang tidak setara.

Dengan kepekaan *gender* maka hasil penelitian akan:

- Lebih seimbang dan rasional, termasuk yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan sumberdaya.
- Mampu mengangkat masalah, bahkan bila si perempuan itu

sendiri tak menganggapnya masalah.

- Mampu menerjemahkan hasil penelitian pada perencanaan dan implementasi yang efektif (Huyzer, 1989).
- Tak berbias lelaki.
- Tak akan menenggelamkan permasalahan *gender* perempuan.
- Mempedulikan perempuan.
- Tak akan menstereotipkan perempuan.
- Tak akan mendomestikasi perempuan.
- Peneliti bisa memisahkan antara yang ideal ataupun normatif dari kenyataan yang terjadi.
- Peneliti mampu menganalisis saling keterkaitan *gender* dengan budaya, kelas, dan ras.

Apabila peneliti tidak peka *gender*, akan terjadi penyimpangan. Kesimpulan bahkan bisa bertolak belakang, misalnya jam kerja yang lebih panjang serta peran yang lebih banyak pada perempuan diinterpretasi peneliti sebagai situasi yang bagus untuk perempuan (bertolak belakang dengan perempuan tereksplorasi, asimetri, persistensi subordinasi, dan domestikasi perempuan).

Dewasa ini berbagai pelatihan *gender* merupakan pekerjaan yang serius, esensial, dan merupakan prakondisi penelitian maupun aksi di semua belahan dunia (Rao et al., 1994). Termasuk di dalamnya

adalah pelatihan dinamika *gender* (Balayan, 1991) yang berguna untuk meningkatkan kapasitas peneliti agar mampu berkomunikasi secara asertif. Pelatihan ini begitu penting, terutama karena bidang keilmuan Studi Wanita belum memasyarakat di kalangan ilmuwan.

11. Rangkaian proses penelitian

Penelitian berwawasan *gender* pada prinsipnya terdiri dari rangkaian berkesinambungan proses I hingga III sebagai berikut:

I

II

III

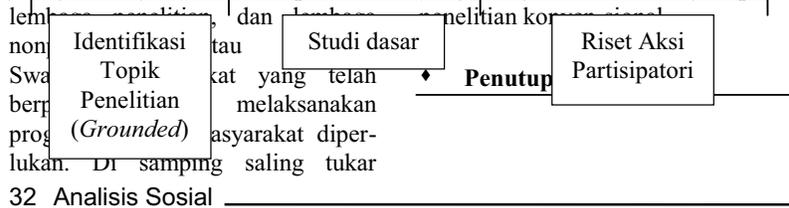
Akan sangat ideal peneliti yang sama terlibat sejak awal dalam keseluruhan rangkaian proses. Khusus bagian III, riset aksi partisipatori, membutuhkan keterampilan, pengalaman, dan waktu yang panjang. Bagi yang belum terbiasa, kerjasama dengan peneliti yang memiliki kemampuan melaksanakan metode ini mungkin diperlukan.

Pengalaman menunjukkan bahwa jaringan kerja sama antarpeneliti,

pengalaman, menyebarkan hasil penelitian, dan menyebarluaskan kemajuan penelitian, jaringan kerja sama memungkinkan penelitian dapat diorganisir dan mampu menarik perhatian para birokrat tingkat nasional ataupun internasional yang dapat diharapkan mempercepat timbulnya perubahan. Jaringan kerjasama juga akan memberi kekuatan pada para peneliti Studi Wanita, lebih-lebih dalam menghadapi tantangan dan

pandangan yang berlawanan dari kaum konvensionalis.

Pada penelitian dengan jaringan peneliti yang melewati batas negara, metodologi penelitian yang tak diketahui sebelumnya bisa dikembangkan bersama oleh semua penelitinya melalui lokakarya atau pertemuan tersendiri di awal penelitian. Tentunya pengembangan metode dengan pendekatan seperti itu membutuhkan biaya besar yang mungkin tak akan terjadi pada



BAHASAN UTAMA

Penelitian berperspektif *gender* bertujuan agar masyarakat yang berada dalam ketidaksetaraan *gender* dapat ditransformasi menjadi egalitarian, di mana perempuan adalah mitra yang sejajar lelaki. Bagi kepentingan ilmiah, hasil penelitian perlu untuk mengembangkan teori dari disiplin keilmuan Studi Wanita yang masih dalam masa pengembangan konsepsi, model maupun teori. Aspek aksiologi dan epistemologi dalam metodologi penelitian Studi Wanita hingga berkembang penuh, belum bisa terpisahkan.

Praxis mewujudkan perubahan merupakan porsi penting dalam penelitian berperspektif *gender*. Saat ini praxis mendapat tantangan berat dari kalangan ilmuwan konvensional. Riset aksi berpendekatan *gender* dalam rangka pemecahan masalah guna meningkatkan status dan peran perempuan dipersepsi dan dilecehkan banyak pihak a.l.:

- dianggap tidak ilmiah;
- dianggap sekedar gerakan perempuan saja;
- dianggap tindakan melawan budaya;
- tindakan melawan kemapanan;
- tak ada bedanya dengan aksi dari Organisasi Bukan Pemerintah; dan
- hanya kegiatan pengabdian masyarakat.

(Sumber: pengalaman pribadi dan pengalaman peneliti Studi Wanita di

berbagai negara dalam suatu Workshop pada *International Interdisciplinary Science on Women* ke VI, Adelaide, 18 - 22 April 1996)

Metodologi penelitian berwawasan *gender* adalah epistemologi bidang keilmuan Studi Wanita. Sebagai bidang keilmuan baru dengan paradigma baru, yang metodologinya khas untuk merubah nasib perempuan, penelitian berwawasan *gender* perlu dikenal. Dewasa ini para peneliti *gender* perlu menyadari bahwa posisi mereka berjalan di depan. Sebagai pionir, mereka mengawali karya penelitian menembus kemapanan ilmiah dunia androsentri. Ketegaran, kesiapan mental, dan pemberdayaan diperlukan guna menghadapi kritik dan penolakan dari berbagai pihak, yang bisa jadi tak hanya dari kaum lelaki, tetapi juga dari sesama perempuan, sesama ilmuwan maupun birokrat.

Penelitian dengan pendekatan *gender* besar kemungkinan akan menelanjangi kenistaan, penderitaan perempuan, dan sebangsanya akibat hubungan *gender* laki-perempuan yang asimetris. Siapkah kita mengadakan penelitian semacam itu? ♦

Daftar Pustaka

- Balyan, T.
1991. "Understanding *Gender* Dynamics & Assertive Communicating", dalam

-
- Raj-Hashim, R. & Heyzer, N. (eds.), *Gender Sensitivity in Development Planning, Implementation and Evaluation*. APDC: Kuala Lumpur.
- Delphy, C. & Leonard, D.
1986. "Class Analysis, Gender Analysis and The Family", dalam *Gender and Stratification*. London: Crampton, R. & Mann, M. (Eds.), Cambridge Prees.
- Eichler, M.
1988. *Nonsexist Research Methods: A Practical Guide*, London: Allen & Unwin Inc., London
- Feldstein, H.S., & Jiggins, J.
1994. *Tools for the Field: Methodologies Handbook for Gender Analysis in Agriculture*. Connecticut: Kumarian Press.
- Huyzer, N.
1991. "Issues & Methodologies for Gender Sensitive Training", dalam Raj-Hashim, R. & Heyzer, N. (eds.), *Gender Sensitivity in Development Planning, Implementation and Evaluation*, APDC: Kuala Lumpur.
- Jayaratne, T.E.
1983. "The Value of Quantitative Methodology for Feminist Research", dalam Bowles, G and Dueli Klein, R. (Eds.). *Theories of Women Studies*, London: Routledge & Kegan Paul.
- Klein, R.D.
1983. "How to do what we want to do: thoughts about feminist methodology", dalam Bowles, G and Klein, D. R. (Editors). *Theories of Women Studies*, London: Routledge & Kegan Paul.
- Mies, M.
1983. "Toward a Methodology for feminist research" dalam Bowles G and Dueli Klein, R. (Editors) *Theories of Women Studies*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Mies, M.
1986. *Patriarchy and Accumulation on A World Scale*. London: Zed Books Ltd.
- Mitchell, J. & Oakley, A.
1987. *What is Feminism?* Oxford: Basil Blackwell Ltd.

BAHASAN UTAMA

- Moser, C.O.N.
1993. *Gender Planning and Development: Theory, Practice & Training*. London: Routledge.
- Overholt, C.A; Cloud, K; Anderson, M. and Austin, J.E.
1991. "Gender Analysis Framework", dalam Rao, A; Anderson, M.B. & Overholt, C.A. (Eds). *Gender Analysis in Development Planning*. Connecticut: Kumarian Press.
- Rao, A; Feldstein, H.; Cloud, K. & Staudt, K.
1991. *Gender Training and Development Planning: Learning from Experience*. Conference Report. New York: The Population Council.
- Rao, A; Appel, M.; Moore K; Feldstein, H.S.
1994. *Reflections and Learnings: Gender Trainers Workshop Report*, Royal Tropical institute - Amsterdam & Population Council - New York.
- Reinharz, S.
1983. "Experiential Analysis: A Contribution to Feminist Research", dalam Bowles, G and Dueli
- Klein, R. *Theories of Women Studies*. (Editors). London: Routledge & Kegan Paul.
- Schimtz, B.
1985. *Integrating Women's Studies into the Curriculum: A Guide & Bibliography*. New York: The Feminist Press.
- Stanley, L. & Wise, S.
1983. "'Back into the Personal'or: Our Attempt to Construct 'Feminist Research'" dalam Bowles, G and Dueli Klein, R. (Editors). *Theories of Women Studies*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Tinker, I.
1990. *Persisten Inequalities: Women and World Development*. Oxford: Oxford University Press.
- Wijaya, Hesti R.
1992. "Metodologi Penelitian Studi Perempuan dari Perspektif Feminis" dalam *Warta Studi Perempuan*, Vol.3, No.1: 25-32

1993a “Sumberdaya Manusia yang Terabaikan: Perempuan Tani dalam Penyuluhan Pertanian” dalam *Masyarakat Indonesia*, Vol.XX, No.2: 233-256

1994. “Pelaksanaan Program Peningkatan Peranan Perempuan di Jawa Timur” dalam *Bestari*, Vol.VII, No.35-43.

-----, Jajuk Juliati, Heru Santoso, Widyanto, dan Susrini Idris

1995. Laporan akhir Penelitian Hibah Bersaing: *Peningkatan Peranan Perempuan dalam Proyek Pertanian Lahan Kering*. Pusat Penelitian Studi Perempuan, LEMLIT, UNIBRAW, Malang - DIKTI, DEPDIBUD.

SENSITIVITAS *GENDER* DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK

Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP

♦ **Ketimpangan *Gender* dan Pengambilan Keputusan**

Mencapai perubahan menuju situasi yang lebih baik adalah keinginan dari setiap perencanaan pemba-ngunan. Tak ada pembangunan yang bermaksud memajukan laki-laki saja atau perempuan saja. Dengan begitu, secara teoritis, pembangunan tidak bias *gender*. Namun, mengapa hasil akhir dari proses pembangunan tidak mem-berikan manfaat yang seimbang antara kedua jenis kelamin? Akibatnya, *gender inequality* ditemui pada banyak bidang kehidupan: pendidikan dan pelatihan, status kesehatan dan nutrisi, akses kepada sumber daya, dan sebagainya.

Penyebabnya sangat kompleks, salah satunya berkaitan dengan proses pengambilan keputusan, baik di dalam lingkup privat (rumah tangga) maupun di dalam lingkup publik. Keputusan di dalam lingkup rumah tangga akan mempengaruhi alokasi dari sumber daya yang dikuasai rumah tangga bersangkutan, seperti besarnya pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, dan makanan

yang diterima anak laki-laki dibanding-kan dengan anak perempuan. Proses pengambilan keputusan di dalam rumah tangga sangat kompleks dan dipengaruhi banyak faktor termasuk norma sosial dan budaya. Walaupun sangat menarik, tulisan ini tidak bermaksud untuk menelaah lebih jauh masalah alokasi sumber daya di dalam lingkup rumah tangga, tetapi akan membahas hal serupa dalam lingkup publik.

Dalam lingkup publik, sumber daya dialokasikan melalui berbagai kebijakan publik. Alokasi sumber daya dalam lingkup publik pun terbukti tidak memberikan kesempatan yang sama berdasar-kan *gender*. Alasan yang paling sering dikemukakan adalah karena selama ini representasi berdasarkan *gender* dalam badan-badan peng-ambilan keputusan di level publik tidak seimbang. Pilihan-pilihan dan partisipasi perempuan dalam proses kebijakan sangat terbatas akibat proses sosialisasi yang selama ini ada menyebabkan perempuan harus melalui banyak rintangan ketika akan memasuki arena politik dan kebijakan. Politik dan kebijakan

dipercaya sebagai dunia laki-laki, karenanya banyak perempuan merasa inferior di hadapan laki-laki di dalam arena politik dan kebijakan. Bahkan kadangkala, memasuki dunia ini masih dianggap sebagai pelang-garan terhadap kodrat perempuan.

Berkaitan dengan hal ini, bagaimana fakta yang ada di Indonesia? Saat ini ada 62 anggota perempuan di DPR, atau sekitar 12,4% dari 500 anggota. Di lingkungan pegawai negeri sipil tahun 1993 perempuan mencakup 35% dari total pegawai, namun persentase pegawai negeri sipil perempuan berbanding terbalik dengan tingkat golongan kepegawaian mereka. Pada tahun yang sama, perempuan di tingkat eselon tinggi di Mahkamah Agung hanya 15%, di Dewan Pertimbangan Agung hanya 7%, dan tak satu pun perempuan di Badan Pemeriksa Keuangan, atau yang menjadi gubernur/wakil gubernur. Ada 2 dari 41 menteri di kabinet sekarang adalah perempuan serta perempuan yang menduduki jabatan pengurus di partai politik proporsinya kurang dari 13% (sumber: Central Bureau of Statistic and Convention Watch Group, 1996).

Sedikitnya perwakilan perempuan dalam posisi politis, akan secara langsung mempengaruhi terwakilinya masalah riil perempuan. Bukankan sudah bisa dibuktikan bahwa persepsi elit politik sebagai

pelaku utama dalam proses kebijakan tentang apa masalah yang penting dan cara meng-atasinya akan mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan? Dan mudah dipahami pula kalau laki-laki kurang peduli terhadap masalah perempuan dibandingkan dengan perempuan sendiri. Oleh karena itu, diyakini semakin banyak perempuan masuk dalam lingkaran pengambilan keputusan, semakin besar peluang isu-isu perempuan akan teragendakan dalam perumusan kebijakan.

Jalan keluar yang ditawarkan oleh mereka yang mendukung argumentasi ini adalah mendesak agar perempuan memiliki akses setara dan dapat berpartisipasi penuh dalam struktur kekuasaan dan perumusan kebijakan. Berbagai cara dilakukan untuk mempercepat tercapainya situasi ini. Beberapa negara seperti Bangladesh, Nepal, India, dan Jerman, misalnya, menetapkan sejumlah reservasi (kuota) bagi anggota perempuan dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan yang strategis seperti parlemen.

Berkaitan dengan upaya ini pula, pemerintah Indonesia sejak tahun 1978 telah menunjuk Menteri Muda Urusan Peranan Wanita yang diubah menjadi Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (Men-UPW) pada tahun 1983 untuk meningkatkan peranan perempuan dalam segala

BAHASAN UTAMA

bidang pembangunan dan mengkoordinasikan segala aktivitas yang dilakukan oleh departemen sektoral maupun lembaga pemerintahan lainnya. Sayangnya, kementerian ini tidak memiliki kewenangan eksekutif dan secara umum program untuk perempuan masih terkonsentrasi pada peranan perempuan dalam keluarga dan masih belum menekankan peranan perempuan dalam arena publik.

Alasan kurangnya keterwakilan perempuan seperti yang dikemukakan di atas cukup mudah dimengerti, namun kurang memuaskan sebab peningkatan representasi perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan ternyata tidak menjamin perempuan yang masuk ke dalamnya akan memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu besarnya wakil perempuan juga tidak menjamin isu-isu *gender* lebih diperhatikan. Artinya, kuantitas keterwakilan saja tidak cukup menjadi jaminan terlahir-kannya kebijakan-kebijakan yang sensitif *gender*.

Sesuatu yang juga penting adalah visi *gender* dari pelakunya sendiri, karena perempuan maupun laki-laki bisa memiliki visi *gender* yang benar atau sebaliknya. Berapapun banyaknya perempuan yang menduduki posisi strategis dalam proses kebijakan, bila mereka buta *gender* dan terdidik untuk hidup

dalam cara yang bias laki-laki, tidak akan banyak gunanya untuk mempromosikan pembangunan yang adil. Bahkan bisa menjadikan upaya mengangkat isu *gender* dalam agenda kebijakan publik menjadi *counter productive*. Oleh karenanya, mereka yang sepakat dengan argumentasi ini tidak peduli pada jumlah perempuan yang masuk dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan yang strategis, namun mereka lebih mementingkan bagaimana meningkatkan sensitivitas *gender* laki-laki maupun perempuan yang memiliki posisi politis. Strategi yang ditawarkan adalah melakukan *awareness raising* atau peningkatan kesadaran bagi para pengambil keputusan dengan menghadapkan mereka pada realitas dari situasi yang dihadapi perempuan.

♦ Kebijakan yang Sensitif *Gender*

Kebijakan publik adalah arah yang harus dipilih untuk memenuhi kepentingan masyarakat yang didasarkan atas keterbatasan sumber daya di satu pihak dan permasalahan yang mendesak di pihak lain. Apabila selama ini kebijakan publik umumnya hanya menguntungkan laki-laki (dengan atau tanpa merugikan perempuan), atau memberikan dampak positif lebih besar kepada laki-laki dibandingkan kepada perempuan, maka dua

pertanyaan berikut menarik untuk diajukan. **Pertama**, apakah mereka (perumus kebijakan publik) tidak menyadari bahwa potensi, aspirasi dan kebutuhan strategis maupun praktis laki-laki dan perempuan berbeda dan dengan demikian harus dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan-kebijakan pembangunan? **Kedua**, apakah mereka justru telah memiliki asumsi tertentu yang stereotip tentang laki-laki dan perempuan yang terinternalisasi sedemikian rupa dan persepsi itu terbawa dalam kehidupan profesional mereka ketika merumuskan suatu kebijakan?

Kedua hal ini, yang pertama kita sebut sebagai “buta *gender*” dan yang kedua kita sebut “bias *gender*”, sama berbahaya karena akan memperkuat ketimpangan *gender* yang telah ada dalam banyak aspek kehidupan masyarakat. Jadi kebijakan seperti apa yang sensitif *gender* itu?

Kebijakan yang sensitif *gender* adalah kebijakan yang mencerminkan kepentingan laki-laki dan perempuan secara setara. Kebijakan-an serupa ini akan mengalokasikan sumber daya sedemikian rupa sehingga memberikan perolehan sosial tertinggi. Investasi pada sektor-sektor tertentu yang akan menjamin perlakuan yang adil untuk kedua jenis kelamin dan mengurangi ketimpangan *gender*, akan menjadi prioritas. Dengan demikian, dalam

proses perumusannya, kepentingan praktis mau-pun strategis perempuan akan masuk menjadi bahan pertimbangan khusus, sehingga kebijakan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk mempercepat tercapainya kesetaraan *gender*.

Dalam prakteknya, memang tidak mudah membuat kebijakan yang sensitif *gender*. Permasalahan utama dalam kebijakan publik pun bukan hanya menjamin adanya ketentuan yang adil, namun juga menjamin bahwa ketentuan itu dijalankan. Dalam pelaksanaannya, beberapa kebijakan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan perempuan ternyata bisa memberikan dampak sampingan yang merugikan perempuan sendiri. Sebagai contoh, tunjangan untuk perempuan yang melahirkan yang terlalu besar bisa membuat pengusaha berpikir dua kali sebelum mempekerjakan perempuan, sehingga pada akhirnya justru dapat memperbesar ketimpangan *gender*. Suatu dilema yang umum dihadapi oleh para perumus kebijakan.

♦ **Ilustrasi: Beberapa Isu *Gender* yang Terabaikan Dalam Perumusan Kebijakan**

Bagaimana suatu isu *gender* masuk dalam agenda kebijakan, sangat bergantung pada persepsi pembuatnya. Ketika membuat suatu keputusan, para perumus kebijakan membuat asumsi-asumsi, misalnya tentang keluarga dengan laki-laki

sebagai kepala rumah tangga. Asumsi ini mengabaikan keberadaan rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan (*female headed household*) yang menurut data BPS tahun 1995 mencapai seperdelapan dari semua kepala rumah tangga. Perempuan yang menjadi kepala rumah tangga kebanyakan adalah janda sedangkan laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga kebanyakan masih mempunyai isteri. Perempuan kepala rumah tangga memiliki beban ganda yakni mencari nafkah sekaligus membesarkan anak-anaknya, dan umumnya hidup di bawah garis kemiskinan (Susenas, BPS, 1995), namun kebutuhan mereka umumnya tidak diperhatikan. Asumsi lain, laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan yang sama, atau asumsi bahwa manfaat pembangunan akan dinikmati oleh setiap anggota rumah tangga secara merata. Asumsi-asumsi semacam ini dengan serta merta menghapuskan banyak hal yang seharusnya diperhatikan dalam proses kebijakan.

Sebagai ilustrasi, bias *gender* juga ditemui dalam kebijakan publik yang berkaitan dengan kependudukan, misalnya dalam program keluarga berencana. Program KB memfokuskan penggunaan kontrasepsi hanya untuk perempuan dan mengabaikan peran reproduksi laki-laki. Hal ini telah terbukti berdampak negatif terhadap pengembangan metode kontrasepsi laki-laki. Berdasarkan survey

demografi dan kesehatan tahun 1995, diperoleh data bahwa lebih dari 90% pengguna kontrasepsi adalah perempuan. Akan tetapi kebutuhan perempuan, hak dan keinginannya berkaitan dengan keluarga berencana masih sering terabaikan, padahal tak ada satupun cara kontrasepsi tanpa efek samping atau komplikasi. Perempuan hanya dijadikan alat untuk melaksanakan suatu program nasional untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

Dalam kasus ini, siapa yang berada dalam jajaran pengambilan keputusan? Di dalam organisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) sebagai penanggung jawab utama program KB nasional, peranan perempuan dalam pengambilan keputusan sangat marjinal. Kepala BKKBN serta pemimpin eselon atas dikuasai oleh laki-laki. Padahal WHO sejak tahun 1991 telah menekankan pentingnya perempuan untuk dilibatkan, baik persepsi maupun pendapatnya dalam perundingan-perundingan yang membicarakan metode kontrasepsi baru. Demikian pula hasil kesepakatan konferensi internasional mengenai kependudukan menekankan keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan, perencanaan dan pengambilan keputusan, manajemen, implementasi, organisasi, dan evaluasi pelayanan program kesehatan reproduksi dan seksual.

Berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan, fenomena yang dihadapi oleh tenaga kerja perempuan dan tenaga kerja laki-laki menunjukkan adanya perbedaan, namun perbedaan ini luput dari perhatian perumus kebijakan. Selama hidupnya, perempuan mengganti status ketenagakerjaannya jauh lebih sering dari laki-laki. Ketika masih anak-anak, remaja, setelah menikah dan tua, mereka aktif dalam kegiatan produktif dengan status yang berbeda-beda. Fenomena yang menarik adalah keberadaan tenaga kerja keluarga tak dibayar (*unpaid family workers*). Secara keseluruhan, sebagian besar perempuan bekerja sebagai pekerja keluarga. Bahkan bila dibandingkan dengan laki-laki, keterlibatan perempuan dalam kerja tak berupah jauh lebih besar. Keberadaan dan situasi yang dihadapi tenaga kerja keluarga sering tidak terekam dalam data statistik resmi. Di daerah pedesaan, hampir 50% dari perempuan yang bekerja adalah pekerja keluarga dan kurang dari 15% laki-laki adalah pekerja keluarga. Sedangkan di kota, lebih dari 15% perempuan dan kurang dari 5% laki-laki adalah pekerja keluarga (sumber: Central Bureau of Statistic and Convention Watch Group, 1996). Partisipasi perempuan dalam pekerjaan *casual* seperti kerja paruh waktu, menjadi sub-kontraktor dan *putting out worker* juga cenderung makin

meningkat. Namun demikian, kebijakan ketenagakerjaan yang ada ternyata masih mengabaikan keberadaan mereka.

♦ Kesimpulan Penutup

Tak ada satu pun kebijakan publik yang akan sukses tanpa partisipasi aktif perempuan. Namun perempuan masih sering hanya dijadikan alat implementasi kebijakan dan masih kurang dilibatkan dalam proses awal ketika kebijakan tersebut dirumuskan. Para perumus kebijakan publik perlu lebih teliti melihat area dimana perempuan banyak terlibat dan membutuhkan perhatian serta mencari peluang-peluang kegiatan yang akan menghasilkan keluaran yang bersifat netral *gender*. Oleh karena itu, meningkatkan partisipasi perempuan dalam struktur politik adalah satu kondisi yang penting untuk meningkatkan sensitivitas *gender* dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, hal itu jangan dijadikan tujuan akhir karena posisi perempuan dalam pengambilan keputusan tidak menjamin terefleksikannya masalah perempuan. Gerakan dari luar struktur politik yang formal untuk menjamin isu-isu *gender* teragendakan dalam perumusan kebijakan publik, juga tetap diperlukan. ♦

BAHASAN UTAMA

World Bank,
1995. *Toward Gender Equality;
The role of Public Policy*,
Washington DC,

Referensi

APWIP & *Gender and Development*
Research Institute,
1994. *Putting Gender issues on
the Policy Agenda*,
Workshop Proceeding,
Bangkok,

Central Bureau of Statistic and
Convention Watch Group
1996. *Indonesia Gender
Information in Key Areas*.

KEPENTINGAN PEREMPUAN DALAM PEMBENTUKAN *CIVIL SOCIETY*

Ratna Saptari dan Artien Utrecht

♦ Pengantar

Tulisan ini bertujuan menyoroti perjuangan kelompok perempuan maupun penampilan isu *gender* dalam konteks pembentukan *civil society*. Telaah tentang keantarkaitan kepentingan perempuan dan masalah *gender*²

¹ Pengertian '*civil society*' kami gunakan dalam artian luas yaitu segala kekuatan sosial yang berada di luar Negara. Diskusi tentang bagaimana hakekat hubungan *civil society* dengan Negara tak akan kami lakukan di sini. Untuk hal ini lihat Arief Budiman (penyunting) 1990, "State and Civil society in Indonesia" *Monash Papers on Southeast Asia* no.22. "Negara" juga kami artikan secara luas yaitu suatu badan yang menguasai segala pranata (administratif, politik, juridis) yang mengatur jalur kekuasaan dan distribusi sumber daya, juga menguasai segala aparat yang mempunyai kemampuan koersif.

² Di sini kami membedakan antara kepentingan perempuan dan hubungan *gender*. Hubungan *gender* adalah hubungan perempuan dan laki-laki yang dibentuk atau dipengaruhi oleh ideologi, norma, harapan peranan ataupun identitas sosial masing-masing *gender*. Kepentingan perempuan terwujud karena ketimpangan dalam

dalam konflik 'negara versus *civil society*' apabila dilihat dalam arena dan tingkatan yang berbeda memungkinkan kita memahami ruang gerak kepentingan perempuan dalam konteks yang lebih luas tersebut. Sejauh mana kepentingan perempuan dan aksi advokasi dipengaruhi atau bahkan dirumuskan oleh aksi *civil society* sebagai gerakan sosial secara umum? Sebaliknya, sejauh mana gerakan sosial di Indonesia mengintegrasikan atau mengutamakan kepentingan perempuan dalam perjuangannya? Pemahaman tentang ruang gerak kelompok perempuan atau kelompok yang memperjuangkan kepentingan

hubungan *gender* yang ada. Sementara ini di kalangan beberapa aktivis dan LSM perempuan ada kecenderungan untuk menolak konsep *gender* karena dianggap terlalu menetralkan posisi perempuan sendiri dalam jargon hubungan laki-perempuan atau *gender relations*. Kami sendiri beranggapan bahwa konsep *gender* tak dapat ditanggalkan dari analisis karena posisi perempuan dibentuk oleh hubungan, struktur atau ideologi *gender*. Apakah kemudian konsep tersebut bersifat mendepolitisasi kesadaran perempuan, tergantung bagaimana kita sendiri menggunakannya.

perempuan tak bisa dilakukan tanpa penjabaran konstelasi keku-asaan dalam kondisi spesifik yang memberi wujud pada konstelasi tersebut. Kemampuan memper-juangkan atau menegosiasikan ruang gerak ini dipengaruhi berbagai hal antara lain: sejauh mana suatu aksi atau kelompok mendapat dukungan anggota *civil society* lainnya; di tingkat mana suatu kepentingan di perjuangkan; bagaimana dukungan politis yang diberikan oleh unsur-unsur aparat negara sendiri dan bagaimana isu itu diterima oleh aparat negara.

Untuk pembahasan ini, kami menyoroiti kegiatan advokasi yang menyangkut tiga isu yang menurut hemat kami mewakili secara baik berbagai komponen yang kami sebutkan di atas yaitu isu pertanahan, perburuhan, dan kekerasan seksual. Isu pertanahan dan perburuhan menyangkut persoalan akses ke sumber daya ekonomi maupun persoalan legitimasi kekuasaan, baik tingkat adat lokal maupun negara. Kepentingan perempuan dalam konteks hubungan *gender* yang ada, jarang dipersoalkan. Masalah kekerasan seksual juga belum banyak dilihat sebagai persoalan sosial atau politik yang 'sah' di kalangan *civil society*. Dalam kenyataannya kekerasan seksual menyangkut pula persoalan legitimasi kekuasaan laki-laki atas perempuan atau orang tua atas orang muda/anak. Dengan demikian isu pertanahan dan per-

buruhan dilihat sebagai 'masalah politis', sementara isu kekerasan seksual dilihat sebagai 'masalah perempuan'. Untuk ketiga isu tersebut kami mempertanyakan sejauh mana ruang gerak *civil society* memperjuangkan isu-isu sosial, sejauh mana perjuangan *civil society* mencakup isu *gender*, dan sejauh mana kelompok perempuan sendiri mempersoalkan 'masalah perempuan' dalam 'isu politis' tersebut.

♦ **Negara, *Civil society*, dan Isu *Gender* : Masalah Global atau Masalah Nasional?**

Perdebatan tentang peran dan posisi negara pada masa kini sulit dilepaskan dari gejala globalisasi dan makin menyatunya *nation-state* dalam kancah perpolitikan dan jaring ekonomi internasional. Peran Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, Organisasi Per-dagangan Dunia, dan Asosiasi-asosiasi regional yang akhir-akhir ini menjamur di berbagai belahan bumi (MEE, NAFTA, APEC) menyadarkan kita akan adanya kekuatan-kekuatan besar yang mempengaruhi kebijaksanaan yang dilakukan di tingkat negara. Dua pendekatan utama mewarnai perdebatan tentang hakekat hubungan negara dengan dunia inter-nasional yang pada akhirnya juga mempengaruhi hubungan dengan *civil society*, yakni: (a) pendekatan yang melihat amat besarnya pengaruh kekuasaan politik inter-nasional dan

negara *superpower* terhadap gerak-gerik dan sikap *nation-state*; dan (b) pendekatan yang melihat otonomi *nation-state* dalam mengambil sikap politik dan ekonomi dalam konteks inter-nasional.

Banyak juga yang mengambil posisi di tengah dengan mengakui bahwa kekuasaan internasional memang berpengaruh besar terhadap gerak-gerik pemerintah Indonesia, tapi diakui pula bahwa untuk isu tertentu dan sampai derajat tertentu *nation-state* mempunyai derajat otonomi tertentu pula. Acapkali kita lihat dalam sejarah politik pembentukan *nation-state* --yang paling jelas masalah Timor Timur-- tak ada mekanisme efektif dari pihak internasional untuk mengendalikan atau mengekang tingkah laku negara. Hal ini sekaligus mem-perlihatkan bahwa isu politik tertentu akan menjadi perhatian semua pihak, baik *civil society* maupun negara, bila muncul tekanan internasional yang biasa-nya datang dari pihak non-pemerintah.

Globalisasi telah membawa masuk ide-ide feminisme ataupun per-hatian terhadap isu *gender*, baik dari institusi pemerintah maupun nonpemerintah. Persoalan-per-soalan *gender* pun banyak diangkat dalam konferensi berkala yang diadakan PBB (terakhir konferensi Beijing). Adalah menarik untuk melihat sejauh mana isu-isu yang kami bahas di bawah mencerminkan intervensi

internasional tersebut. Sebelumnya kami harus memahami dulu perdebatan yang menyangkut hubungan antara *gender* dan negara. Ada dua pandangan yang membedakan posisi kaum feminis. Pertama adalah pendekatan yang melihat kebijakan pemerintah dan aparatus negara pada hakekatnya patriarkal³. Pendekatan kedua mendukung pandangan yang ber-sifat kurang fungsionalistis dengan argumen bahwa 'patriarki negara' tak dapat menjelaskan kebijakan maupun sikap pemerintah yang kerap kontradiktif dan muncul dari berbagai hal, antara lain tujuan pembuat kebijakan yang tak selalu sejalan; tawar-menawar dan perjuangan yang menyangkut penerapan kebijakan-kebijakan tertentu⁴.

Dalam hal ini kami menyadari bahwa banyak kebijakan maupun peraturan pemerintah menganut ideologi patriarkal, seperti misal-nya dalam pembentukan organi-sasi-organisasi maupun aturan/ undang-undang untuk perempuan yang menekankan pemisahan 'publik' dan 'domestik' dan menekankan peran domestik mereka⁵. Tetapi memang perlu diakui

³ Lihat C. MacKinnon (1989) *Toward a Feminist Theory of the State*. Cambridge, Harvard Univ. Press

⁴ Lihat Gordon (1990) "The New Feminist Scholarship on the Welfare State" dalam L. Gordon (ed.) *Women, the State and Welfare*. Madison, The University of Wisconsin.

⁵ Walaupun banyak yang telah mengungkapkan berbagai kebijakan

pula bahwa kontradiksi dalam perumusan maupun dalam penerapan undang-undang sering terjadi yang mencerminkan kepentingan-kepentingan yang tidak selalu terintegrasi dengan baik.

♦ **Potensi dan Keterbatasan Perjuangan Kelompok Perempuan**

Perempuan dan Masalah Per-tanahan

Dibandingkan dengan periode sebelumnya, masa pasca-1965 merupakan masa saat isu tanah kurang menjadi masalah per-debatan politik dalam struktur politik resmi seperti di parlemen atau lembaga eksekutif. Padahal dengan fokus pemerintah ke pertumbuhan ekonomi dan makin meningkatnya nilai tanah sebagai akibat perilaku para

dan program yang mencerminkan sifat patriarkal negara, perlu disebutkan dua tulisan terakhir yaitu J. Suryakusuma "The State and Sexuality in New Order Indonesia" dan Sylvia Tiwon "Models and Maniacs: Articulating the Female in Indonesia" keduanya dalam buku Laurie Sears (1996) *Fantasizing the Feminine in Indonesia*. Durham, Duke University Press.

spekulator tanah, sengketa tanah semakin meningkat. Di kalangan LSM, sengketa tanah memainkan peranan penting dalam politik masyarakat sipil dan Negara. Kasus pertanahan yang akan kami pakai sebagai pokok bahasan adalah konflik tanah di Sugapa, Sumatra Utara⁶.

Kasus Sugapa mengandung ber-bagai unsur konseptual yang signifikan untuk diskusi kita: masalah kolusi antara modal dan aparat negara; masalah konsep 'komunitas'; masalah perbedaan persepsi tentang hukum adat dalam kaitannya dengan hukum negara; masalah perbedaan *gender* dalam komunitas; serta masalah jurang antara 'pusat' dan 'daerah'. Kasusnya kurang lebih sebagai berikut. Sejak awal tahun 1987 penduduk Sugapa dilarang mengembalakan ternaknya di tanah komunal desa tersebut. Ternyata, kepala desa (bukan kepala adat) telah menyerahkan tanah komunal tersebut ke IIU (perusahaan swasta yang hendak mengelola *eucalyptus* di daerah itu) tanpa kesepakatan warga desa. Usaha untuk mem-balik keputusan ini dilakukan oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan warga desa. Mula-mula kepala desa didekati, kemudian camat, namun semua usaha pendekatan ini tak

⁶ Bahan ini sepenuhnya diangkat dari tesis MA Indira Simbolon (1991) berjudul *Whose Violating Whose Laws? An Analysis of the 'Sugapa Case' from Legal, Development and Gender Perspectives*.

membuahkan hasil. Malah kebalikannya, aparat lokal dan aparat Kodim beserta staf perusahaan IJU memperingatkan warga masyarakat bahwa mereka akan ditindak seandainya pohon kayu putih dicabut, namun ancaman ini tak dihiraukan penduduk. Selama dua tahun terjadi sabotase terhadap usaha perusahaan dengan cara penca-butan pohon-pohon kayu putih dan penanaman tanaman sub-sistensi (jagung). Taktik ini dikombinasikan dengan usaha lobi, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, maupun tingkat nasional, namun tak membuahkan hasil apa-apa.

Dalam aksi-aksi ini kaum perem-puan Sugapa memainkan peranan amat penting. Karena mereka bertanggungjawab atas pengolahan tanah, maka apa yang terjadi dengan tanah tersebut menjadi bagian dari kepentingan mereka⁷. Banyak di antara mereka yang terlibat dalam perjuangan memper-tahankan hak atas tanah adat mengatakan bahwa apabila upaya itu diserahkan kepada kaum laki-laki, mereka khawatir sumber penghidupan untuk generasi men-datang akan dilepaskan (Simbolon 1991). Selain dari pentingnya arti tanah bagi eksistensi hidup para warga -- juga bagi kaum

perem-puan yang merasa bertanggung jawab atas eksistensi ini- - peran perempuan juga dirasakan penting oleh warga laki-laki setempat karena aparat militer seringkali bertingkah kurang ganas terhadap perempuan. Oleh karena itu, perempuan dianggap lebih strategis disertakan dalam taktik per-lawanan.

Walaupun kasus Sugapa ini telah lama diperjuangkan di tingkat lokal, namun baru menjadi berita nasional ketika sejumlah perem-puan Sugapa pergi ke Jakarta membawa keluhan mereka ke Departemen Dalam Negeri (Dep-dagri). Di depan kantor Depdagri, mereka berunjuk rasa. Pihak Depdagri kemudian menjanjikan kasus mereka akan diselesaikan, namun setelah mereka kembali ke Sugapa, uluran tangan dari pusat -- baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak LSM-- tak kunjung datang. Sampai saat ini kasus Sugapa masih tak ter-selesaikan dan penduduk belum memperoleh perbaikan nasib.

Setiap kasus konflik tanah menyangkut beberapa dimensi utama, yaitu:

- a) dimensi hukum, dalam hal ini bagaimana hukum negara, hukum adat, ataupun hukum agama berperan atau diinter-pretasikan oleh berbagai pihak yang berkepentingan;
- b) struktur akses terhadap tanah -- bisa berupa kepemilikan atau

⁷ Perempuan Batak hidup dalam sistem patrilineal dan pada dasarnya tak mempunyai hak atas tanah kecuali melalui hubungannya sebagai istri atau anak seorang laki-laki warga masyarakatnya. Untuk paparan lebih rinci lihat Simbolon (1991).

-
- kekuasaan atas tanah-- sebelum intervensi terjadi;
- c) proses pengambilalihan tanah -- bisa oleh pihak negara atau swasta-- dan perjuangan penduduk mempertahankannya; dan
 - d) penyelesaian serta restrukturisasi akses terhadap tanah dari struktur yang lama ke struktur yang baru.

Konflik tanah amat kuat berlandaskan pertentangan antara kepentingan 'nasional' dan kepentingan 'daerah' atau kepentingan 'pusat' dan 'pinggiran'. Dalam berhadapan dengan kepentingan dan kekuasaan pusat, nilai-nilai adat atau komunitas sebagai simbol yang menyatukan masyarakat 'daerah' atau 'pinggiran' sering ditonjolkan secara kuat. 'Komunitas' memang sering mempengaruhi gerak-gerik penduduk lokal dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh tersebut muncul dalam bentuk aturan-aturan yang jelas tentang pen-distribusian sumber daya yang ada, pengalokasian hak dan tanggung jawab menyangkut sumber daya tersebut, serta dalam sistem pewarisan, perkawinan, dan pembagian kerja seksual. Namun, penonjolan 'komunitas' dalam berhadapan dengan kekuatan pusat seringkali mengesampingkan perbedaan-perbedaan kepentingan yang ada di dalamnya. Memang dalam konteks pengusuran dan pengambilalihan tanah misalnya, hilangnya sumber daya yang dapat mencukupi sebagian atau seluruh

kehidupan warga komunitas akan dirasakan oleh semua warga komunitas. Hal ini tidak mengesampingkan kenyataan bahwa baik sebelum, selama, dan sesudah konflik tanah berlangsung selalu ada perbedaan akses dan kuasa atas tanah tersebut.

Seberapa jauh 'komunitas' ini bisa menjadi bantalan sosial bagi mereka yang kurang mendapat akses tersebut, bergantung pada kebudayaan maupun struktur sosial daerah yang bersangkutan. Dalam kasus Sugapa, 'komunitas' menjadi tumpuan kaum perempuan. Tanpa eksistensi komunitas' --dalam bentuk tanah adat-- kaum perempuan tak dapat melangsungkan kehidupan mereka dan anak-cucunya. Hal ini tidak menyangkal kenyataan bahwa dalam sistem patrilineal akses terhadap tanah hanya bisa diperoleh melalui suami, ayah, atau anak laki-laki. Namun, ketika ada pilihan lain saat individu dihadapkan langsung dengan komersialisasi atau sistem pasar yang amat kompetitif, banyak warga Sugapa memilih hidup dalam naungan 'komunitas'. Studi Indira Simbolon merupakan suatu pengecualian dalam studi konflik tanah yang mempersoalkan posisi perempuan dan hubungan *gender*.

Studi atau aksi perjuangan mempertahankan hak atas tanah di Indonesia umumnya tak mempersoalkan *gender*, karena kebanyakan terpaku dengan kegiatan

mempertentangkan ‘komunitas’ dan ‘negara’ tanpa usaha memahami lebih dalam akses terhadap sumber daya, pembagian kerja, serta norma-norma yang berlaku, yang membedakan posisi perempuan dan laki-laki. Banyak yang berpandangan bahwa karena secara strategis tak menguntungkan untuk menonjolkan heterogenitas kepentingan penduduk maka usaha untuk memahami heterogenitaspun ditanggalkan. Mereka yang sering memperjuangkan kepentingan perempuan atau mengangkat isu *gender* juga terlanjur mengklasifikasikan isu seperti ini sebagai masalah ‘politik’, sehingga pengintegrasian masalah *gender* dalam masalah pertanahan tak tampak. Hal ini bisa terlihat pula dalam aksi membela hak-hak buruh sebagaimana akan dipaparkan di bawah.

Perempuan dan Masalah Perburuhan

Dengan besarnya peran negara dalam perumusan dan penerapan peraturan perburuhan serta penangan sengketa yang muncul, usaha untuk memperbaiki kondisi kerja dan posisi buruh dalam kancah perpolitikan nasional terutama muncul sebagai persoalan buruh berhadapan dengan negara ketimbang persoalan buruh berhadapan dengan modal. Dalam gelombang pemogokan buruh yang berlangsung sejak awal 1990 buruh perempuan memegang peranan penting saat menghadapi aparat

keamanan maupun berdemonstrasi di muka gedung Depnaker. Namun dalam jaringan-jaringan gerakan perburuhan yang bermain di tingkat regional atau nasional, kelompok perempuan atau tokoh perempuan tak banyak berada dalam posisi pengambil keputusan. Aktor-aktor utama dalam forum perburuhan nasional kebanyakan aktivis LSM dan mahasiswa yang peduli pada nasib kaum buruh, tapi tak banyak mempedulikan isu *gender* dalam masalah perburuhan.

Mereka yang peduli nasib buruh perempuan umumnya hanya mempersoalkan masalah normatif yang berkaitan dengan hak cuti melahirkan dan cuti haid. Lagi-lagi ada sedikit kebingungan di antara kelompok terakhir ini untuk mengintegrasikan persoalan perempuan dengan persoalan perburuhan. Tuntutan atas H-1 dan H-2 merupakan bagian dari paket tuntutan yang menyangkut hubungan kerja dan mencerminkan ada usaha pengintegrasian tersebut. Namun persoalan-persoalan *gender* lain tak pernah digubris. Masalah kekerasan seksual baik yang terkandung dalam hubungan produksi maupun di luarnya belum secara serius merupakan bagian dari diskursus politik perburuhan. Segregasi kerja atas *gender* yang menyebabkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan perempuan dicap tak terampil, sehingga upahnyapun lebih rendah dari laki-laki; pengendalian buruh

melalui berbagai hubungan paternalistis antara majikan dan buruh perempuan; penggunaan teknologi baru yang sering menggarisbawahi kerja tak terampil perempuan dan menghambat kemungkinan mobilitas vertikal mereka; tak pernah terintegrasikan dalam diskursus perburuhan.

Faktor-faktor yang menghambat perempuan turut aktif dalam kancah perpolitikan perburuhan yang lebih bersifat jangka panjang juga tak pernah tertangani dengan baik. Banyak aktivis buruh perempuan, terutama yang telah berkeluarga, tetap mendapat kesulitan berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan atau diskusi yang acapkali dilakukan pada malam hari karena pembagian kerja seksual yang berlaku dalam rumah tangga mereka. Keterlibatan dalam kegiatan perburuhan sering menyebabkan buruh perempuan harus berhadapan dengan suami/orang tua yang lebih suka melihat istri/ anak mereka menjalankan tugas mereka di rumah. Walaupun perempuan banyak yang aktif dalam aksi turun ke jalan, kegiatan perumusan strateginya tetap berada di tangan laki-laki yang umumnya tidak peka terhadap persoalan-persoalan di atas. Masalah pelecehan seksual misalnya, memang bukan hanya problematis bagi kaum aktivis melainkan juga bagi buruh perempuan sendiri karena menyangkut 'moralitas perempuan' yang acap-kali berstandar ganda:

'kesucian' perempuan dipersoalkan sementara tingkah laku seksual laki-laki tidak. Kasus Marsinah yang terjadi tahun 1993 yang lalu menunjukkan bahwa persoalan perburuhan dalam diskursus umum yang berlaku saat itu pada akhirnya diterjemahkan semata-mata sebagai kebrutalan militer terhadap buruh. Hubungan pengusaha-buruh atau-pun penganiayaan seksual terhadap Marsinah tenggelam dalam retorika anti-militer.

Kasus Zaenab dan kasus Marsinah menunjukkan beberapa perbedaan sekaligus persamaan. Zaenab mewakili persoalan yang khusus dihadapi buruh perempuan, yaitu pelecehan seksual. Marsinah mewakili persoalan buruh secara umum karena ia terlibat pemogokan buruh yang menuntut perbaikan kondisi kerja dan kenaikan upah. Kasus Zaenab terangkat sebagai berita nasional ketika tampil sebagai persoalan pengadilan (dan melibatkan demonstrasi para aktivis LSM dan mahasiswa saat persidangan jalan); kasus Marsinah tampil sebagai berita nasional maupun internasional dengan peristiwa pembunuhannya oleh aparat militer. Keduanya menjadi perhatian masyarakat ramai setelah menjadi urusan di arena 'publik'. Namun ketika tampil sebagai urusan publik, segera pula masalah konflik bergeser menjadi konflik 'negara versus buruh'; atau 'majikan versus buruh', sementara masalah keke-
rasan

seksual dan hubungan *gender* yang timpang menjadi pudar.

Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

Kekerasan seksual, terutama dalam bentuk pemerkosaan, telah terdokumentasi di berbagai media massa selama 15 tahun terakhir. Namun kampanye anti-pemerkosaan baru dilakukan tahun 1991 atas prakarsa Kalyanamitra, sebuah LSM untuk advokasi persoalan perempuan, mengikuti jejak ke-lompok perempuan di Malaysia yang berhasil melakukan kampa-nye antikekerasan seksual tingkat nasional secara besar-besaran pada tahun 1988. Berbeda dengan apa yang terjadi di Malaysia, kampa-nye di Indonesia lebih terbatas pada lokakarya serta pembentukan jaringan di antara LSM yang berpartisipasi dalam dua lokakarya tersebut, yang sifatnya jangka pendek. Proses kampanye ini menghadapi berbagai persoalan yang sejak awal muncul di berbagai tingkat, seperti kesulitan menjembatani perbedaan kultural dan kelas antara berbagai kelompok; mengusahakan reformasi hukum terutama hukum pidana dan mengubah pendefinisian perempuan dan keluarga dalam undang-undang; serta ketidakmampuan menyediakan keahlian dan tenaga untuk mendirikan *crisis centre* atau memberi nasehat dalam pen-dirian *crisis centre* tersebut.

Persoalan pertama dan kedua menyangkut hambatan yang berasal dari masyarakat awam, sementara persoalan ketiga lebih merupakan persoalan organisatoris Kalyanamitra sendiri. Pada saat diadakan lokakarya memang terdapat kesamaan bahasa dan kesepakatan untuk menjalin konti-nuitas jaringan dan itikad untuk merekam dan saling tukar infor-masi tentang kekerasan seksual, namun ketika para peserta loka-karya kembali ke lokasi masing-masing, mereka dihadapkan pada kekakuan organisasi mereka --yang tak semuanya merupakan organi-sasi perempuan-- maupun perbeda-an pandangan tentang pentingnya isu kekerasan seksual.

Kebanyakan aktivis LSM di daerah sulit mengintegrasikan per-soalan kekerasan seksual dengan persoalan-persoalan penting lain-nya yang dihadapi masyarakat di 'pinggiran' yang menghadapi dominasi 'pusat' - baik dari pihak pemerintah maupun nonpeme-rintah. Masalah reformasi hukum dihadapkan pula dengan berbagai kesulitan. Secara hukum, pengerti-an kejahatan seksual dipengaruhi oleh asumsi-asumsi kelas mene-ngah dan bias laki-laki. 'Kejahatan seksual' didefinisikan sebagai 'penetrasi' (penis ke vagina) dan hanya dianggap kejahatan bila dilakukan di luar perkawinan. Dengan demikian hanya perkosa-an di luar perkawinan yang diang-gap sebagai kejahatan seksual. Ini berarti segala bentuk pelecehan seksual

lainnya tak masuk ke dalam definisi ini. Perkawinan dianggap sebagai pranata yang suci sehingga perkosaan di dalam pranata itu tak mungkin terjadi.

Di balik pendefinisian ini tercakup ideologi *gender* yang menggolongkan perempuan ke dalam dikotomi 'perempuan suci' dan 'perempuan tak bermoral (asusila)'. Perempuan yang melestarikan keluarga harmonis dan sejahtera adalah 'perempuan suci', sementara perempuan yang bertindak di luar konteks keluarga harmonis dan sejahtera adalah 'perempuan asusila'. Banyak dari ahli hukum perempuan yang telah terlibat dalam diskusi menuju perumusan kembali GBHN, tersandung pada pemikiran konvensional hukum yang menolak mengintegrasikan konsep perkosaan di dalam perkawinan ke dalam definisi kejahatan. Penolakan ini tak sampai ke tingkat pengendalian oleh negara, karena telah terjadi di tingkat komunitas ahli hukum sendiri.

Pada paruh pertama 1995 masalah perkosaan muncul lagi dalam perdebatan umum -- kali ini dengan dukungan media massa -- ketika suatu keluarga didatangi kawanan perampok yang mencuri barang-barang berharga dan memperkosa ibu serta anak di depan suami/ ayah mereka. Diskusi terbuka terjadi ketika

beberapa organisasi perempuan⁸ di Jakarta menggunakan peristiwa itu untuk mengajak masyarakat luas turut memikirkan persoalan kekerasan seksual. Dengan bantuan stasiun radio swasta dibuka suatu *hot-line* untuk menampung komentar ataupun persoalan-persoalan menyangkut kekerasan seksual. Hal ini diikuti dengan dimuatnya tulisan tentang kasus pemerkosaan tersebut dan dialog terbuka yang melibatkan kurang lebih 200 orang.

Konteks kampanye yang dilakukan pada aksi kedua ini amat berbeda dengan yang pertama. Tiga aspek tampak membedakan keduanya, yaitu tujuan, komposisi peserta atau audiens, dan format kegiatan. Kegiatan pertama bertujuan mendirikan sel-sel kegiatan di tingkat daerah dan mempersiapkan kampanye bersama di tingkat nasional. Hal ini menuntut lembaga yang terlibat untuk menjembatani perbedaan pusat dan daerah baik dalam hal prioritas kegiatan; serta dukungan infrastruktur organisasi maupun ketrampilan menangani kasus kekerasan seksual --dalam hal ini dukungan di bidang hukum, kesehatan, psikologi, peningkatan kesadaran. Dalam penanganan kekerasan seksual, hambatan dari kaum perempuan yang mengalami kekerasan seksual juga kerap muncul

⁸ Terutama yang berperan dalam hal ini adalah Kalyanamitra dan Asosiasi Perempuan untuk Keadilan.

mengingat pengalaman ini membawa stigma sosial yang sulit dihilangkan.

Aksi kampanye kedua melibatkan publik dan bidang gerak yang lebih terbatas: berlokasi di Jakarta dan bertujuan terutama meningkatkan kesadaran sosial. Sekalipun dalam aksi kampanye kedua ini kebutuhan akan *crisis centre* tetap ada, namun tidak spesifik berusaha menghasilkan sesuatu yang konkrit. Hal ini terjadi karena inisiatif awal bukan datang dari organisasi yang terlibat melainkan dari kejadian sehari-hari.

♦ Kesimpulan

Beberapa faktor yang kami sebutkan pada bagian pengantar sebagai hal yang mempengaruhi ruang gerak kepentingan perempuan dalam *civil society*, yaitu dukungan anggota *civil society* yang lain dan tingkatan gerak, telah kami perhatikan dalam ketiga isu tersebut di atas. Dukungan *civil society* umumnya atas suatu isu, amat dipengaruhi pandangan tentang posisi isu tersebut dalam mempertanyakan atau menantang legitimasi negara. Masalah tanah dan perburuhan dilihat sebagai masalah politik, karena sengketa yang terjadi dianggap melanggar hak asasi manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Kalaupun ada yang memperhatikan kepentingan perempuan, lebih dilihat sebagai kepentingan untuk mempertahankan hak hidup, sebagai penang-gung

jawab reproduksi keluarga. Dimensi *gender* yang lebih dalam lagi, seperti soal tempat perempuan dalam sistem pertanahan, pewaris-an, perkawinan, dan pembagian kerja seksual jarang diintegrasikan dalam usaha pemahaman maupun dalam usaha kampanye. Isu keke-rasan seksual mendapat dukungan dari sebagian orang, tapi dilihat sebagai 'isu perempuan' semata. Oleh karena itu, kampanye ten-tang ketiga isu tersebut seringkali terjerumus dalam dikotomi 'masalah politik' dan 'masalah perempuan' atau nonpolitik.

Penting dilihat pula tingkatan di mana gerakan itu dilakukan dan perbedaan hakekat gerakan di tingkat 'pusat' dan 'pinggiran'. Seringkali suatu isu di tingkat lokal yang menonjolkan kompleks-sitas persoalan --soal kekerasan seksual dan perburuhan; akses perempuan ke tanah dan masalah pertanahan-- sampai ke tingkat nasional, isu tersebut bisa dirumus-kan kembali/disederhanakan sedemikian rupa sehingga melupakan dimensi-dimensi *gender*-nya. Walaupun untuk strategi politik hal ini seringkali dirasakan perlu karena homogenitas dianggap lebih baik ditonjolkan daripada heterogenitas kepentingan, bila ingin menantang kekuasaan yang lebih besar. Akan tetapi pada akhirnya semua pihak, termasuk mereka yang dianggap memonitor dan mewakili kepentingan perempuan, seringkali turut dan teng-gelam dalam diskursus ini. Di lain pihak kegagalan

kampanye keke-rasan seksual bisa terjadi bila 'masalah perempuan' tak bisa diintegrasikan ke dalam masalah politik atau sosial di tingkat lokal.

Bagaimana mencari keseimbangan dalam menonjolkan kepentingan perempuan sekaligus menemukannya dalam konteks politik dan sosial yang lebih luas? Mungkin yang pertama adalah membedakan antara strategi politik dan analisis sosial. Apabila untuk strategi politik, penyederhanaan kenyataan sering dianggap lebih menjamin gerakan, untuk kepentingan analisa hal ini tak akan membawa banyak kegunaan, dan pada akhir-nya akan mempersempit wawasan gerakan itu sendiri. ♦

DAFTAR ISTILAH

ISTILAH-ISTILAH UMUM DALAM WACANA *GENDER*

DISKRIMINASI SEKSUAL :

Pembedaan perlakuan terhadap sesama manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin.

DOMINASI :

Kedudukan berkuasa/menguasai, dari kelompok jenis kelamin tertentu (laki-laki) terhadap pihak jenis kelamin lainnya (perempuan). Kedudukan ini diperoleh akibat adanya hal-hal tertentu seperti stereotipe, karakteristik seksual, dll. yang menyebabkan terjadinya perluasan kontrol terhadap aktivitas seksual di tangan si penguasa.

FEMININ :

Karakteristik seksual yang bersifat kewanitaan

FEMINISME :

Suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja dan dalam keluarga, serta tindakan/gerakan sadar oleh perempuan maupun lelaki untuk mengubah keadaan tersebut. Tindakan/gerakan berdasarkan faham ini, menurut *Women Thesaurus* terdiri dari banyak aliran dengan tuntutan yang berbeda dari masing-masing aliran.

***GENDER* :**

Perbedaan tingkah laku (*behavioral differences*) antarjenis kelamin yang merupakan hasil bentukan masyarakat (*socially constructed*). Sifatnya bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan, melainkan diciptakan oleh masyarakat melalui sebuah proses sosial dan budaya yang panjang. Oleh karena itu, *gender* berubah dari waktu ke waktu dari satu tempat ke tempat lain, bahkan antara kelas yang satu dengan yang lainnya

KEKERASAN SEKSUAL:

Perbuatan seseorang atau kelompok orang terhadap jenis kelamin tertentu (umumnya terhadap perempuan) yang menyebabkan cedera, mati, kerusakan fisik atau barang orang lain, dan bersifat paksaan. Kekerasan seksual di sini bisa dirunut dari yang paling berat, misalnya pemerkosaan sampai pada yang paling halus yaitu pelecehan seksual.

KERJA PRODUKSI :

Proses kerja yang mengeluarkan hasil/menghasilkan sesuatu. Dalam masyarakat kapitalis biasanya sesuatu yang dihasilkan itu diartikan mempunyai nilai tukar. Dalam diskusi tentang *gender*, konsep kerja produktif ini seringkali diasosiasikan sebagai pekerjaan publik (sektor umum). Oleh karena itu, kerja-kerja domestik yang dilakukan perempuan misalnya memasak yang juga suatu pekerjaan yang menghasilkan sesuatu untuk dikonsumsi oleh keluarga, seringkali dianggap bukan sebagai kerja produksi.

KERJA REPRODUKSI :

Konsep reproduksi sebenarnya memiliki tingkat abstraksi teoritis yang berbeda-beda : reproduksi sosial, reproduksi biologis, dan reproduksi tenaga kerja. Reproduksi sosial berkaitan dengan upaya-upaya mempertahankan suatu sistem sosial, dalam hal ini pokok dasarnya adalah merinci struktur apa saja yang harus direproduksi agar reproduksi sosial dapat berlangsung secara utuh. Reproduksi biologis artinya perkembangan fisik umat manusia atau pengembangbiakan umat manusia. Sedangkan reproduksi tenaga kerja (yang komponen dasarnya berasal dari reproduksi biologis) adalah perawatan sehari-hari pekerja dan calon tenaga kerja, dan alokasi pelaku-pelaku dalam berbagai posisi di dalam proses pekerjaan. Kedua konsep reproduksi yang disebut terakhir sering di asosiasikan dengan pekerjaan domestik (kerumahtanggaan).

MARJINALISASI PEREMPUAN :

Usaha membatasi/pembatasan, peminggiran yang terjadi terhadap perempuan. Pembatasan atau peminggiran biasanya berwujud upaya-upaya untuk menggiring perempuan pada pekerjaan-pekerjaan yang mirip dengan pekerjaan domestik, sehingga seringkali penghargaan atas kerja itu menjadi rendah akibat dari asumsi bahwa pekerjaan yang mirip dengan pekerjaan di sektor domestik secara alamiah/kodrati merupakan pekerjaan perempuan.

MASKULIN :

Karakteristik seksual yang bersifat kelaki-lakian

PATRIARKHI :

Sebuah sistem sosial di mana dalam tata kekeluargaan sang ayah menguasai semua anggota keluarganya, semua harta milik dan sumber-sumber ekonomi, dan membuat semua keputusan penting. Dewasa ini sistem sosial yang patriarkhis mengalami perkembangan dalam hal lingkup institusi sosialnya, di antaranya lembaga perkawinan, institusi ketenagakerjaan dll. Pengertiannya pun berkembang dari 'hukum Ayah' ke hukum suami, hukum bos laki-laki, dan hukum laki-laki secara umum pada hampir semua intitusi sosial, politik, dan ekonomi.

PELECEHAN SEKSUAL :

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang memandang rendah, meremehkan, menganggap tidak berharga jenis kelamin tertentu.

Menurut KUHP pasal 294 pelecehan seksual diartikan sebagai berikut:

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharaannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

PEMBAGIAN KERJA SEKSUAL :

Suatu proses kerja yang diatur secara hierarkis, yang menciptakan kategori-kategori pekerjaan subordinat yang dikelompokan berdasarkan jenis kelamin dan stereotipe jenis kelamin tertentu. Pembagian kerja secara seksual ini telah melahirkan kerja-kerja khas perempuan yang secara hierarkis menempati tempat subordinat, sehingga karenanya dihargai lebih rendah. Kerja-kerja khas untuk tiap jenis kelamin umumnya dikaitkan dengan peran seksualnya, sehingga dikenal istilah kerja produktif untuk laki-laki dan kerja reproduktif untuk perempuan.

PERAN GANDA PEREMPUAN:

Dua atau lebih peran yang harus dimainkan oleh seorang perempuan dalam waktu bersamaan. Adapun peran-peran tersebut umumnya mengenai peran domestik (sebagai ibu rumah tangga) dan peran publik (umumnya dalam pasar tenaga kerja).

SEKS :

Perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis, hal ini berkaitan dengan yang secara fisik melekat pada masing-masing jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin merupakan kodrat, sehingga sifatnya permanen dan universal.

SEKSUALITAS :

Menggambarkan sebuah spektrum biologis, psikologis, dan sosiologis dari masing-masing jenis kelamin. Spektrum ini mengandung ciri, sifat, peranan seks yang disandang oleh masing-masing jenis kelamin, pengalaman, dan sebagainya yang berorientasi seks.

STEREOTIPE :

Konsepsi atau pelabelan sifat-sifat terhadap kelompok jenis kelamin tertentu berdasarkan prasangka, subyektif, tanpa penelitian empirik, dan tidak tetap. Stereotipe umumnya bersifat negatif, sehingga menimbulkan diskriminasi yang merugikan kelompok jenis kelamin yang diberi label tersebut.

SUBORDINASI :

Kedudukan bawahan, kelas kedua (perempuan) terhadap pihak yang dominan (laki-laki). Subordinasi perempuan umumnya tercipta akibat stereotipe yang dikaitkan dengan pembagian kerja secara seksual. Akibat posisi subordinat itu, peranan dan hasil kerja perempuan selalu dinilai lebih rendah dibandingkan peranan dan hasil kerja laki-laki yang menempati posisi dominasi. ♦ (Frida Rustiani)

RUANG METODOLOGI

FOCUS GROUPS: TEKNIK PELAKSANAAN

Rimbo Gunawan²

(Bagian kedua)

Pada Jurnal edisi ke-3 telah diuraikan mengenai sejarah dan prinsip-prinsip Focus Groups (FG), berikut akan diuraikan tentang bagaimana melakukan sebuah FG. Proses pelaksanaan FG terdiri dari tiga fase yaitu pertama fase konsep-tualisasi masalah dan isu yang akan diangkat, kedua fase pelaksanaan FG itu sendiri yang terdiri dari serangkaian wawancara dan pengamatan, dan ketiga fase analisis.

♦ **Fase Konseptualisasi**

Fase koseptualisasi merupakan tahap yang paling penting bagi berhasilnya sebuah FG, karena dalam tahap ini peneliti menentukan maksud, tujuan, serta kegunaan studi yang akan dilaksanakan. Selanjutnya peneliti membuat dan

mengembangkan seperangkat rencana yang akan memandu proses penelitian. Termasuk dalam kegiatan pada fase ini adalah penentuan siapa yang akan menjadi peserta diskusi atau sumber informasi.

Menentukan maksud dan tujuan

Pada tahap ini, proses yang dilalui tidak jauh berbeda dengan metode-metode penelitian lain. Perencanaan dimulai dengan mengorientasikan diri terhadap tujuan studi kemudian mengorganisasikannya dalam suatu kerangka pemikiran yang logis dan runtut. Beberapa pertanyaan penting layak dilontarkan untuk memandu konseptualisasi maksud dan tujuan ini. Pertanyaan itu adalah:

- Mengapa studi ini harus dilakukan?
- Jenis informasi apa yang diperlukan?

¹ Tulisan ini disusun mengacu pada Richard A. Krueger, 1988. *Focus Groups: A Practical Guide For Applied Research*. London: Sage Publication; David L. Morgan. 1988. *Focus Groups: As Qualitative Research*. London: Sage Publication; dan diskusi pada pelatihan FGD di AKATIGA yang dipandu DR. Irwanto, 1 Agustus 1995.

² Peneliti AKATIGA - Pusat Analisis Sosial.

-
- Siapa yang memerlukan informasi tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dilontarkan guna mendapatkan umpan balik dari calon pengguna/pemesan studi, sehingga tercapai kesepakatan tentang masalah yang akan dikaji dan jenis informasi apa yang diperlukan untuk menjawab masalah tersebut. Di sini masing-masing pihak (peneliti dan pemesan) dituntut untuk saling terbuka. Ketertutupan dan motif-motif tersembunyi merupakan hambatan yang harus dihindari.

Ketika kesepakatan pada tahap ini dicapai, langkah berikutnya adalah menentukan metode (prosedur) yang cocok. Pemilihan dan penetapan metode penelitian dilakukan setelah menimbang kelebihan dan kekurangan masing-masing secara relatif sesuai dengan keterbatasan-keterbatasan waktu, anggaran, keahlian, dan sebagainya. Hal penting yang perlu diperhatikan ketika menggunakan FG adalah mempertimbangkan informasi yang diperlukan atau diharapkan pengguna/pemesan. Hal ini melibatkan individu-individu tertentu yang mempunyai kepentingan dalam studi. Tahap ini mengandung tiga komponen utama yaitu:

1. Mengidentifikasi siapa yang akan menggunakan informasi.
2. Menentukan informasi apa yang diperlukan.

3. Mengetahui bahwa informasi tersebut benar-benar diperlukan.

Biasanya para pembuat keputusan merupakan pengguna utama informasi, namun bisa jadi orang lain pun menggunakan informasi yang berkaitan. Oleh karena itu, peneliti harus mengalokasikan waktu untuk mengeksplorasi lebih lanjut apa yang sebenarnya diinginkan. Para pengambil keputusan ini mungkin saja tidak tahu persis apa yang sebenarnya ingin dicari, mereka biasanya hanya mengatakan “pokoknya saya ingin yang begitu dan saya tidak tahu bagaimana hal itu diperoleh”. Untuk mengatasi hal ini perlakukan mereka sebagai individu-individu, bukan sebagai kategori kelompok orang dan pandulah mereka dengan lebih tajam untuk mengidentifikasi apa sebenarnya yang diinginkan. Strategi ini bisa dilakukan dengan cara meminta mereka menggambarkan bagaimana kira-kira hasil akhir atau bagaimana hasil itu digunakan kemudian. Biasanya cara ini akan memberikan gambaran bagi mereka mengenai apa yang diinginkan, selanjutnya mereka akan menggambarkan ciri-ciri dan sifat dari “produk” yang akan dihasilkan. Dari penggambaran ini, peneliti akan memperoleh suatu “spektrum pemahaman” atas informasi yang diinginkan pemesan. Apabila hal ini dapat dilakukan maka peneliti akan

METODOLOGI

lebih mudah merancang proses dan cara pengumpulan informasi .

Informasi ini diinginkan karena berbagai alasan, bisa untuk mengambil suatu keputusan, menilai suatu proyek atau program, atau bisa juga semata-mata ingin tahu saja. Untuk itu peneliti harus mengorek lebih lanjut latar belakang hal ini dengan menanyakan “apa motivasi anda untuk melakukan/mengetahui hal ini; siapa yang akan tertarik dengan hasil studi ini; atau siapa yang akan terpengaruh oleh studi ini?” dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan ini akan memandu peneliti untuk mengetahui gambaran lebih lengkap mengenai apa yang sebenarnya diinginkan.

Menentukan peserta FG

Peneliti harus memperhatikan tujuan studi dan mencari siapa yang dapat memberikan informasi. Dalam melakukan hal ini peneliti harus membuat kriteria mengenai orang yang akan diminta keterangan atau informasi sespesifik mungkin, sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Misalnya pengambil keputusan ingin mengetahui persepsi karyawan tentang program yang sedang dijalankan. Sepintas hal ini cukup jelas bahwa informasi akan diambil dari karyawan, namun karyawan yang mana, siapa mereka, apakah seluruh karyawan atau kelompok karyawan tertentu baik menurut lama bekerja, kelompok keahlian, divisi kerja atau yang

lainnya? Di samping itu, mungkin perlu diperhatikan juga aspek-aspek lain seperti lokalitas, usia, *gender*, tingkat pendapatan dan sebagainya. Apabila kriterianya sudah jelas, kita dapat mencari informasi langsung pada sasaran yang kita inginkan. Jadi, semakin spesifik kelompok calon partisipan, secara relatif hasil studi akan semakin tepat pada sasarannya. Lihat uraian tentang karakteristik FG pada tulisan terdahulu.

Menyusun rencana kerja dan perkiraan kebutuhan

Peneliti seharusnya memulai pekerjaan ini dengan membuat deskripsi masalah dan rencana kerja. Rencana kerja berisi prosedur dan tahap kegiatan yang akan dikerjakan, siapa yang akan mengerjakan dan kapan hal tersebut dilaksanakan, termasuk anggarannya. Semua ini sebaiknya tertulis sehingga memberikan beberapa keuntungan, pertama memaksa peneliti dan kelompok pelaksanaan lainnya untuk bertindak dalam rangkaian kegiatan yang logis. Seringkali suatu rencana yang kelihatannya masuk akal dalam kepala, ternyata ketika ditulis di kertas dengan mudah terlihat kurang tepat. Kedua, rencana kerja tertulis memungkinkan adanya koreksi dan umpan balik. Sesuatu yang tertulis lebih mudah untuk diperbanyak dan didiskusikan daripada rencanarencana abstrak di dalam kepala. Ketiga, menjamin dan memastikan bahwa waktu dan sumber daya yang

diperlukan tersedia pada saat yang tepat.

Rencana tertulis yang kita buat kemudian didiskusikan dengan anggota tim atau kepada orang lain yang mengerti bagaimana melaksanakan FG. Mereka bisa memberikan komentar terhadap hal-hal yang tidak perlu, tidak praktis, dan tidak jelas. Umpan balik yang diperoleh pada tahap perencanaan ini akan lebih baik daripada di belakang.

Rencana yang baik seharusnya berisi informasi tentang “skenario” atau kronologi kegiatan yang akan dilakukan yaitu yang berisi tahapan kegiatan, waktu, orang yang bertanggung jawab, dan juga yang cukup penting adalah rencana anggaran. Mungkin lebih mudah dan menarik bila kronologi kegiatan ini dibuat dalam bentuk bagan atau tabel.

♦ Fase Pelaksanaan

Fase pelaksanaan meliputi tiga tahap berbeda yaitu menyusun dan mengajukan pertanyaan atau isu-isu yang akan diangkat dalam diskusi; mempelajari keterampilan memandu diskusi dan mempelajari karakteristik kelompok partisipan.

Mengajukan pertanyaan

Kualitas jawaban yang diberikan secara langsung berkaitan dengan kualitas pertanyaan yang diajukan. Untuk itu diperlukan pemikiran yang serius dan teliti untuk menyusun dan mengembangkan pertanyaan, karena **pertanyaan** merupakan jantungnya FG. Pertanyaan-pertanyaan ini tampaknya diluncurkan secara spontan tetapi harus benar-benar dipikirkan dan disusun serta dipertanyakan dalam urutan yang tepat, sehingga dapat memaksimalkan informasi yang ingin diperoleh. Tentu saja mengajukan pertanyaan yang berkualitas bukanlah hal yang mudah, karena hal itu memerlukan pemikiran, konsultasi, dan latar belakang pengetahuan mengenai materi yang akan didiskusikan. Namun demikian, ada beberapa hal yang dapat dijadikan pegangan untuk mempersiapkan pertanyaan yang baik, di antaranya:

- Pertanyaan sebaiknya bersifat terbuka (*open-ended questions*). Pertanyaan terbuka memungkinkan responden atau partisipan menjawab dari berbagai dimensi, tanpa kesan dibuat-buat, atau sudah dirancang sebelumnya. Beri keleluasaan kepada peserta untuk merespons sesuai dengan gaya dan kebiasaannya. Pada dasarnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah “stimulus” bagi responden atau peserta. “Stimulus” ini bisa diajukan

dengan terstruktur atau bebas. Pertanyaan bebas diajukan untuk mengetahui keluasan informasi yang dipu-nyai responden sedangkan pertanyaan terstruktur dapat diajukan untuk membatasi pembicaraan pada isu spesifik. Pertanyaan yang bebas misal-nya “*Apa/bagaimana pendapat anda tentang perpustakaan?*” Pertanyaan yang lebih terstruktur misalnya “*Bagaimana pendapat anda tentang pelayanan perpustakaan kami?*”

- Menghindari pertanyaan yang bersifat dikotomis. Pertanyaan yang bersifat dikotomis adalah pertanyaan yang dapat dijawab secara sederhana dengan jawaban “ya” dan “tidak”. Pertanyaan seperti ini cenderung mematikan diskusi dan cenderung menghasilkan jawaban yang mendua yang mengganggu kejernihan diskusi. Padahal FG ingin mendapatkan jawaban yang sebenarnya dan tegas sesuai dengan aspirasi peserta/responden.
- Menghindari pertanyaan yang dimulai dengan kata “mengapa”. Pertanyaan yang dimulai dengan kata “mengapa” biasanya menginginkan jawaban rasional yang didahului proses berpikir dan refleksi. Namun biasanya hal ini sulit dijawab dengan cepat dan membutuhkan waktu berpikir relatif lebih lama. Hal ini bisa mengganggu kelancaran diskusi. Lebih dari itu

pertanyaan “mengapa” mempunyai kesan mengorek seperti interogasi, sehingga “menantang” peserta untuk memberikan jawaban yang sifatnya bertahan (*defensive*). Akan lebih mudah bila pertanyaan itu diubah sedikit formatnya dengan kata “apa” atau “bagaimana” yang kelak jawabannya bisa disimpulkan sebagai alasan rasional. Daripada mengajukan pertanyaan “*Mengapa anda sering datang ke perpustakaan AKATIGA?*” yang terkesan “galak”, lebih baik diubah dengan pertanyaan “*Apa yang membuat anda tertarik untuk mengunjungi perpustakaan AKATIGA?*” atau “*Hal apa yang anda sukai dari perpustakaan AKA-TIGA?*” yang terkesan lebih “ramah”.

Keterampilan memandu diskusi

Keberhasilan sebuah FG selain ditentukan oleh pertanyaan-pertanyaan yang baik, peserta yang tepat, dan kerja sama tim, juga ditentukan oleh keahlian moderator dalam mengendalikan lalu lintas pembicaraan. Jadi, memilih moderator yang baik merupakan salah satu prasyarat agar FG berhasil.

Seorang moderator seharusnya merupakan seseorang yang “menyenangkan”, terbiasa dan mengerti proses dan dinamika kelompok. Tenang dalam mengendalikan

jalannya diskusi, dapat mengembalikan pembicaraan pada jalur yang telah disepakati, mempunyai kemampuan untuk mendorong peserta aktif merespons, dan menjaga tingkat antusiasme peserta tanpa harus kehilangan perhatian pada topik, serta mempunyai ketepatan waktu yang baik. Lebih dari itu seorang moderator haruslah seorang pendengar yang baik, pembicara yang santun, dan menguasai topik yang didiskusikan dengan baik serta tidak kalah pentingnya juga dia harus mempunyai rasa humor yang tinggi. Hendaknya diperhatikan juga jenis kelamin moderator karena dalam banyak kasus bila hal ini tidak dipertimbangkan justru akan mengganggu jalannya diskusi.

Agar FG terlaksana dengan baik, diperlukan orang lain yang membantu moderator dalam mengawasi jalannya diskusi. Pembantu moderator ini akan mencatat apa yang terjadi selama diskusi yang mencakup apa yang diungkapkan secara verbal maupun gerakan-gerakan tubuh tertentu dari peserta. Pembantu moderator bisa saja mendekati peserta yang terlalu aktif sehingga potensial mengganggu jalannya diskusi atau men-datangi peserta yang terlalu pasif agar mau terlibat dalam diskusi. Pembantu ini pun harus berusaha menjaga situasi agar terkendali dan mengurangi hal-hal dari luar yang bisa mengganggu jalannya diskusi, seperti kegaduhan

di luar tempat diskusi, peserta yang datang terlambat, telepon, dan sebagainya.

Sebagaimana dalam penelitian, hal yang penting dari proses ini adalah mencatat informasi yang diperoleh selama diskusi berlangsung. Pencatatan dan pendokumentasian dalam FG biasanya dilakukan dengan cara merekam dan mencatat. Merekam dapat dilakukan dengan menggunakan alat perekam, sementara catatan dilakukan oleh moderator dan pembantu moderator. Moderator biasanya mencatat secara ringkas dan pembantu moderator akan mencatat dengan lengkap termasuk bahasa tubuh peserta saat merespons atau saat ditanya.

Setelah memilih moderator dan pembantunya, hal selanjutnya adalah memulai diskusi. Pola umum urutan kegiatan pada tahap ini adalah: ucapan selamat datang, dalam kesempatan ini diperkenalkan juga seluruh anggota tim yang melakukan FG. Lalu diuraikan sekilas tentang topik yang akan didiskusikan, maksud dan tujuan kegiatan, serta alasan pemilihan peserta diskusi. Dijelaskan pula aturan dasar diskusi, dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan pertama pembuka diskusi dan akhirnya diskusi dimulai. Pertanyaan pertama ini merupakan pembuka yang mengantarkan peserta pada diskusi sekaligus mengundang mereka untuk aktif meresponsnya.

METODOLOGI

Dalam mengajukan pertanyaan dan memandu diskusi hendaknya diperhatikan juga waktu jeda (*pause*) dan penelusuran lebih lanjut (*probe*). Jeda diperlukan untuk memikirkan apa yang harus ditanyakan/dilakukan selanjutnya. Sedangkan penelusuran dan pendalaman suatu topik bisa dilakukan dengan *mem-probing*, misalnya dengan mengajukan pertanyaan “*Bisakah anda menjelaskan apa yang Anda maksud tadi*” atau “*Bisakan anda memberikan contoh dari penjelasan tadi*”, dan sebagainya.

Seorang moderator harus penuh perhatian dan dapat merespons komentar peserta baik secara verbal maupun nonverbal. Bahasa tubuh seperti mengangguk atau menggelengkan kepala serta *celetukan* atau respon verbal singkat dari moderator, dalam beberapa hal bisa menolong namun dalam hal lain justru akan merusak suasana. Peserta dengan beragam latar belakang pun bisa memberikan masalah bagi moderator. Secara umum, ada empat tipe peserta dalam suatu diskusi yaitu “ahli/pintar”, “tukang *ngomong*”, “pemalu” dan “tukang *ngelantur*”. Keempat tipe peserta ini bisa memberikan masalah tersendiri yang harus diatasi oleh moderator.

“Si ahli/pintar” sering menjadi rujukan peserta lain, sehingga menutup kesempatan orang lain

untuk merespons. Hal ini terjadi karena yang bersangkutan menempati posisi tertentu di masyarakat, atau pernah mengalami hal serupa, dan sebagainya. Untuk mengatasi hal ini moderator bisa mengantisipasi dengan memberikan penjelasan pada saat pembukaan bahwa semua pendapat dinilai sama pentingnya, tidak ada yang benar dan salah serta tidak ada kaitannya dengan pendidikan, kedudukan, atau atribut lain.

“Si tukang *ngomong*” kadang memandang dirinya sebagai orang yang pandai. Sebelum diskusi dimulai sering dia sudah banyak bicara sehingga bisa “mengganggu” dan mempengaruhi peserta lain. Langkah yang tepat untuk mengontrol orang yang bertipe ini adalah dengan menempatkannya di sisi moderator sehingga lebih dekat untuk diatur, misalnya dengan menepuk atau merangkul untuk menghentikan bicaranya. Bila hal ini tidak bisa juga diatasi maka teguran yang lebih keras bisa diberikan.

Peserta pemalu cenderung sedikit bicara dan suaranya pelan. Untuk mengaktifkan tipe peserta yang demikian dapat dilakukan dengan cara memberikan sedikit waktu dan tatapan agar kepercayaan dirinya tumbuh. Agaknya akan lebih baik bila “si pemalu” ini ditempatkan berhadapan dengan moderator.

Tipe peserta lain adalah yang suka berbicara berputar-putar atau *ngelantur*. Untuk mengatasi hal ini moderator bisa memintanya langsung pada pokok masalah yang ingin disampaikan dan bila hal ini tidak juga berhasil moderator bisa mengalihkan pandangan kepada peserta lain dan segera bertanya atau mengulang pertanyaan begitu si tukang *ngelantur* jeda.

Hal lain yang perlu diperhatikan moderator adalah mengakhiri diskusi, memberikan beberapa catatan penting yang diperoleh dalam diskusi, dan mempertanyakan kembali apakah catatan itu sesuai dengan yang diutarakan para peserta diskusi. Ketika membacakan atau menyampaikan catatan ini moderator juga harus mengamati respons verbal dan nonverbal dari masing-masing peserta, apakah ada yang menunjukkan kebingungan, ketidaksetujuan, atau ketidakpuasan. Untuk hal ini moderator bisa mengajukan klarifikasi, dengan tetap dilakukan dengan pertanyaan terbuka misalnya, "*Apakah masih ada hal yang perlu ditambahkan?*" atau "*Adakah yang tertinggal dari diskusi kita?*". Terakhir, ucapkan terima kasih dan memberikan kenang-kenangan bila hal itu dibicarakan di muka.

Peserta diskusi

Kelompok diskusi dalam FG adalah sebuah kelompok yang memiliki ciri

tertentu dalam hal jumlah dan komposisi peserta, tujuan yang ingin dicapai, dan berbagai aturan yang diterapkan di dalamnya. Sebuah kelompok diskusi dalam FG, secara tipikal terdiri dari sejumlah orang yang masing-masing memiliki beberapa karakteristik tertentu sesuai kebutuhan. Idealnya masing-masing anggota kelompok tidak saling mengenal.

Jumlah peserta FG minimal terdiri dari 4 orang dan sebanyak-banyaknya 12 orang. Jumlah ideal untuk mencapai hasil yang optimal adalah 7-10 orang. Ukuran kelompok ini sebaiknya kecil agar setiap orang mendapat kesempatan yang sama untuk berbagi ide dan pengalaman, namun juga harus cukup besar agar dapat merangkul dan memberikan keragaman persepsi (lihat tulisan bagian pertama pada Jurnal Edisi 3).

Apabila kelompok terlalu kecil, kurang dari 4 orang, anggota kelompok akan cepat mendapat giliran berbicara dan ada kemungkinan tidak terjadi eksplorasi ide dan pendapat. Situasi ini akan mengurangi keragaman dan keluasan ide atau pandangan. Peserta akan cepat bosan karena yang berbicara dan dibicarakan itu-itu juga. Sebaliknya, bila jumlah peserta terlalu besar, lebih dari 12 orang, cenderung akan terjadi pengelompokan kecil. Peserta akan lebih sering berdiskusi atau berbisik dengan peserta di sebelahnya, bosan

METODOLOGI

menunggu giliran bicara karena terlalu banyak padangan dan pendapat yang muncul.

Peserta mempunyai karakteristik tertentu yang relatif homogen dan sebaiknya tidak saling mengenal. FG (harus) terdiri dari sejumlah orang yang mempunyai karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Asas homo-genitas ini menjadi salah satu dasar pengambilan peserta dan harus dijelaskan kepada mereka ketika diskusi dimulai. Misalnya peserta diskusi dipilih karena mempunyai persamaan pengalaman, profesi, *gender*, pengguna produk yang sama, usia, dan sebagainya. Kriteria yang digunakan bisa tunggal ataupun kombinasi, tergantung kebutuhan. Prosedur untuk mendapatkan peserta ini bisa dilakukan dengan cara sampling baik melalui kuesioner yang disebar atau melalui telepon.

Peserta FG biasanya terdiri dari orang-orang yang tidak saling mengenal satu sama lain, bahkan idealnya satu sama lain benar-benar asing. Ketidak-saling-kenalan bisa menghilangkan bias-bias relasi antarpeserta yang cenderung membatasi komunikasi di antara mereka. Situasi ini akan mendorong mereka untuk berpendapat bebas dan terbuka tanpa harus merasa sungkan, karena mereka berpikir tidak akan bertemu lagi. Kondisi tidak saling kenal ini sulit diperoleh

dalam suatu komunitas, namun sebaiknya orang yang berkawan dekat atau yang bekerja pada suatu lembaga yang sama tidak dimasukkan dalam kelompok diskusi yang sama.

Hal lain yang perlu juga diperhatikan adalah relasi (*familiarity*) antara pewawancara atau moderator dengan para peserta diskusi. Sesuai dengan istilahnya, moderator sebaiknya dipilih orang yang benar-benar netral dan tidak memihak serta bukan orang yang berada dalam hubungan hierarkis dengan para peserta diskusi. Sebaiknya, peneliti sendiri yang menjadi moderator.

Penekanan pada aspek *familiarity* di antara para peserta merupakan isu analisis dalam FG. Peneliti tidak tahu dan tidak mampu mengisolasi (mendapatkan) hal apa yang mempengaruhi para peserta untuk merespons topik yang didiskusikan. Apakah temuan berkaitan dengan masalah yang didiskusikan tersebut dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, masa kini, atau masa datang? Hal-hal inilah yang harus ditemukan oleh sang peneliti.

♦ Fase Analisis

Fase terakhir adalah melakukan analisis terhadap data yang diperoleh. Menganalisis data terdiri dari kegiatan menguji, membuat kategorisasi, membuat tabulasi atau

merekombinasikan bukti/data untuk menjawab proposisi atau hipotesis atau pertanyaan yang diajukan di awal penelitian. Bebe-rapa hal yang bisa membantu proses analisis adalah catatan lalu lintas pertanyaan (diskusi), trans-krip diskusi, rekaman diskusi, informasi latar belakang para pe-serta, dan catatan atau ringkasan yang dibuat moderator atau pem-bantu moderator.

Pada dasarnya area proses analisis berada pada peran dan sikap analitis sang peneliti. Hal yang dapat membantu melihat ini ada-lah dengan memperhatikan konti-num analisis mulai dari **data men-tah -- pernyataan deksriptif -- sampai interpretasi**. Data mentah merupakan pernyataan langsung dari para peserta diskusi ketika pertanyaan diajukan kepada me-reka. Pernyataan ini bisa disusun dalam berbagai kategori, misalnya jawaban disusun mulai dari per-nyataan yang sangat mendukung sampai yang sama sekali menolak, atau dikategorikan berdasarkan kelompok umur responden, karak-teristik responden, dan lain-lain.

Bagian berikutnya adalah per-nyataan deskriptif, berupa ring-kasan atau deksripsi pernyataan atas komentar responden. Di sini peneliti memberikan deskripsi sing-kat pernyataan yang didasarkan pada data mentah diikuti dengan ilustrasi yang juga diambil dari data mentah.

Pengambilan ilustrasi ini harus disesuaikan dengan tujuan studi itu sendiri.

Interpretasi merupakan bagian ter-sulit dalam proses analisis. Inter-pretasi ini adalah upaya untuk membangun atau memberikan arti atas data. Jadi, tujuannya adalah memberikan pengertian dan pema-haman. Interpretasi (harus) mem-perhitungkan bukti, indikasi atau tanda di balik kata. Sumbernya tidak hanya dari transkrip tetapi juga dari pengamatan langsung. Lebih dari itu, hal ini juga perlu memperhatikan dan mengingat kembali intensitas komentar para responden, contoh spesifik yang dikemukakan dan konsistensi per-nyataan setiap responden.

Sifat analisis pun perlu memper-hatikan asas sistematis dan veri-fikatif. Artinya, melihat apakah seluruh pekerjaan berjalan menu-rut tahapan yang runtut dan setiap tahapan tersebut bisa dikontrol. Dengan demikian, bila seseorang melakukan hal yang sama dengan menggunakan data yang sama maka diharapkan kesimpulan yang diambil pun akan sama. Dalam proses analisis ini seringkali latar belakang, pengalaman, harapan, dan kecenderungan peneliti ikut berpengaruh dan hal ini bisa saja “merusak” atau menyimpangkan kesimpulan yang diambil. Bahkan sering juga terjadi ‘pemaksaan’ dalam pengambilan data. Maksud-

METODOLOGI

nya, pengambilan data dilakukan semata-mata hanya untuk menguatkan dugaan atau hipotesis yang diajukan sehingga mengabaikan data lain yang turut berpengaruh.

Proses analisis dimulai dengan mengamati tingkat *familiarity* antarpeserta juga antara peserta dan moderator bila yang berperan sebagai moderator bukan peneliti yang bersangkutan. Hal ini harus diperhatikan dan diberi catatan karena sangat mungkin terjadi distorsi. Segera setelah diskusi selesai, moderator dan pembantu moderator memeriksa seluruh catatan dan rekaman. Mereka dianjurkan untuk membuat catatan dan membandingkan serta mendiskusikannya bila ada perbedaan. Di dalamnya harus diperhatikan pula beberapa catatan dan informasi berkenaan dengan:

- Perubahan lalu-lintas diskusi dan pertanyaan.
- Karakteristik peserta.
- Deskripsi frasa atau kata yang digunakan oleh setiap peserta ketika merespons pertanyaan.
- Tema dan subtema respons atas pertanyaan berkaitan dengan karakteristik masing-masing peserta.
- Deskripsi tingkat “kegairahan” peserta untuk terlibat dalam diskusi.
- Konsistensi antara pernyataan dan tindakan. Perlu diperhatikan juga bahasa tubuh masing-masing.

- Hal-hal baru yang muncul.
- Suasana diskusi.

Setelah semua informasi dan catatan terkumpul, mulailah dibaca dengan seksama. Selama melakukan kegiatan ini peneliti harus siap dengan catatan, komentar, dan deskripsi serta ringkasan atas pernyataan yang diberikan peserta. Perhatian diberikan pada upaya menemukan tema atau pola jawaban peserta, baik yang berkaitan dengan jawaban maupun dengan karakteristik peserta. Hal yang harus diperhatikan dalam tahap ini adalah:

- Penggunaan kata atau frasa. Kata dan frasa akan banyak digunakan dalam proses FG, di sini peneliti harus membuat dan menentukan derajat dan nuansa kata yang digunakan. Peneliti juga harus dapat memahami kata atau istilah spesifik yang muncul dalam proses diskusi kemudian menangkap dan merumuskan maknanya, baik secara harfiah maupun kontekstual. Arti harfiah adalah arti sebenarnya dari kata atau istilah yang muncul, sedangkan arti kontekstual adalah dalam konteks apa kata atau istilah itu muncul.
- Memperhatikan konteks. Respons partisipan akan dipicu oleh stimulus (pertanyaan-pertanyaan) yang diberikan, baik dari moderator maupun dari sesama peserta. Peneliti harus menemukan konteks ini dan menginterpretasikannya sesuai

dengan konteksnya. Konteks bisa menunjuk pada respons yang diberikan -- baik setuju maupun tidak setuju -- atau pada intonasi dalam merespons. Di sini perlu diperhatikan tekanan yang diberikan oleh masing-masing peserta, apalagi bila peserta menggunakan kata yang sama persis.

- Memperhatikan konsistensi internal. Peserta FG selalu berubah (pendapat), kadang hal itu berlawanan dengan apa yang dikemukakan sebelumnya. Ketika hal ini terjadi peneliti harus melacak kembali alur pembicaraan untuk melihat kembali perubahan dan sebab-sebab perubahan tersebut serta menjelaskannya.
- Memperhatikan spesifikasi setiap respons. Respons tiap orang seringkali didasarkan pada pengalamannya dan ini mempunyai spesifikasi sendiri. Informasi yang mempunyai spesifikasi ini hendaknya mendapat tempat penting daripada informasi yang umum atau samar. Sampai derajat tertentu spesifikasi bisa diperoleh melalui *probing* (pengorekan lebih dalam).
- Menemukan ide besar. Mencoba mencari latar belakang dari setiap pernyataan yang diberikan, apakah hal itu berkaitan dengan kecenderungan yang terjadi lebih dari sekedar yang didiskusikan. Sering kali hal ini

luput dari analisis sehingga diperlukan waktu khusus untuk menyaring semua informasi yang diberikan. Tidak jarang ditemukan ide-ide yang tidak bisa diantisipasi sebelumnya dan itu akan memberikan gambaran lain atas aspirasi yang diberikan peserta atau calon pengguna produk. Ide besar biasanya muncul dari akumulasi bukti-bukti, kata dan frasa yang digunakan, bahasa tubuh, intensitas komentar, dan lain-lain.

- Memperhatikan tujuan studi. Peneliti harus kembali melihat maksud dan tujuan studi dan informasi yang diperlukan oleh “pemesan”.

Akhirnya, dalam proses FG, kerja seorang peneliti bagaikan detektif yang berusaha mencari petunjuk guna menemukan pola dan kecenderungan kelompok. Dimulai dari

pengumpulan informasi, kemudian merangkainya menjadi sebuah gambar utuh. Tugas peneliti adalah menggambarkan seluruh informasi yang diperoleh dan menjelaskannya kepada pengguna/ pembaca. Berani mencoba?! ♦

RESENSI BUKU

**POSISI PEREMPUAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SEBUAH KAJIAN HISTORIS**

Rina Herawati

Judul : (*Development Studies*) *Planning Development With Women
Making A World Of Difference*
Penulis : Kate Young
Penerbit : London, Macmillan. 1993 (VII + 187 P)



Saat ini isu *gender* dan pembangunan kian marak dibicarakan terutama di kalangan LSM, aktivis perempuan, serta gerakan-gerakan yang memperjuangkan hak perempuan. Di kalangan perguruan tinggi yang mempelajari masalah-masalah sosial dan pembangunan, topik ini juga menjadi salah satu kajian utama. Sayangnya, buku-buku yang membahas masalah *gender* secara lengkap (teoritis dan analisis yang berdasarkan hasil-hasil penelitian) sangat sulit didapatkan terutama di perpustakaan-perpustakaan di perguruan tinggi yang ada di negara-negara berkembang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Kate Young menulis buku ini.

Buku setebal 187 halaman ini mencoba untuk menyajikan 'pengetahuan' dasar seputar masalah *gender* dan pembangunan dengan lebih dahulu memberikan *overview* tentang peristilahan dan perkembangan debat-debat utama mengenai tiga dekade pembangunan (tahun 1960-1969, 1970-1979 dan 1980-1989). Dalam dekade pertama, perempuan dipandang terutama dari perspektif kesejahteraan keluarga dan sebenarnya tidak diperhitungkan dalam rencana pembangunan. Pada dekade kedua, gerakan *Women In Development* (WID) meluas dengan cepat. Perempuan, bukan dalam hubungannya dengan laki-laki, menjadi fokus utama dalam analisis. Pada dekade ketiga, terlihat adanya konsolidasi dari gerakan WID.

Uraian pada bab I mengenai berbagai kebijakan pembangunan di negara-negara berkembang pascaperang dunia II, membahas bagaimana perempuan diposisikan dalam berbagai bentuk kebijakan itu. Dalam analisisnya, Young melihat bahwa banyak pemerintah di negara berkembang yang semula menerapkan kebijakan redistribusi dengan pertumbuhan ekonomi, mencoba beralih ke strategi baru yang lebih difokuskan pada *basic needs* yang gagasan awalnya berasal dari *International Labor Organisation* (ILO). Hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan kontribusi perempuan dalam pembangunan, karena diakui bahwa perempuanlah (ibu dan perempuan dewasa lain dalam keluarga) yang menyediakan *basic needs* keluarga (meliputi air, makanan, pakaian, dan pemeliharaan kesehatan). Sayangnya, walau ada pengakuan terhadap peran perempuan, iklim ekonomi yang tidak menentu yang melanda sebagian besar negara berkembang pada tahun 1970-1980 menyebabkan gagasan ini tidak pernah diimplementasikan sebagai kebijakan pembangunan (hal. 8).

Debat mengenai berbagai bentuk kebijakan itu menjadi dasar bagi Young dalam menganalisis kasus-kasus yang terjadi pada perempuan baik di sektor pertanian (kasus sub-Sahara Afrika), sektor industri (sebagai pekerja pabrik, kasus di Asia) dan sektor informal di perkotaan (kasus di Amerika Latin dan Karibia).

Pada kasus perempuan di sektor pertanian, Young menunjukkan betapa pentingnya memahami kompleksitas distribusi pekerjaan rumah tangga dalam menganalisis rencana pembangunan pertanian. Secara singkat, Young mengupas hal-hal yang berkaitan dengan isu perempuan di sektor pertanian yaitu pembagian kerja dan pembagian sektor produksi berdasarkan *gender*, relasi produksi dan rumah tangga pedesaan, distribusi sumber daya, serta akses atas tanah, tenaga kerja dan jasa-jasa. Dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan antara lain oleh Ester Boserup (Boserup, 1970) dan Jean Henn (Henn, 1983), Young menyimpulkan bahwa selama ini ada dua macam strategi pembangunan pertanian dalam kaitannya dengan perempuan. Yang pertama adalah rencana pembangunan bagi perempuan dan yang kedua adalah rencana pembangunan dengan melibatkan perempuan.

Pembedaan rencana dan strategi pembangunan atas dua macam 'aliran' inilah sebenarnya yang merupakan pokok bahasan dalam buku ini. Dalam uraian selanjutnya terlihat bahwa fenomena semacam ini juga tampak dalam kasus perempuan pekerja di sektor formal di perkotaan (hal 82), khususnya di sektor industri serta perempuan yang bekerja di sektor informal (hal 103). Baik secara eksplisit maupun tidak, Young menyatakan bahwa selama ini

lebih banyak strategi pembangunan yang menempatkan perempuan sebagai 'obyek'. Hal itu terjadi antara lain karena ada masalah dengan konsep-konsep yang berkaitan dengan pembangunan, misalnya aktivitas ekonomi dan pengangguran. Konsep mengenai aktivitas ekonomi, sampai saat ini memang masih menjadi bahan perdebatan. Perempuan yang mencari air di tempat yang jauh dari rumah untuk keperluan rumah tangga, selama ini tidak dianggap melakukan aktivitas ekonomi, sedangkan laki-laki yang bekerja mengangkut air ke kota disebut melakukan aktivitas ekonomi. Begitu juga dengan adanya istilah 'hanya menunggu rumah' untuk istri/perempuan yang tidak bekerja di luar rumah dengan mendapatkan upah (Young, 1987a).

Dalam pada itu, ada kesulitan lain yang pasti akan ditemui oleh peneliti yang hendak menganalisis masalah perempuan dan pembangunan. Kesulitan ini tidak lain adalah kurangnya data-data statistik yang memadai tentang aktivitas (ekonomi) perempuan. Tidak adanya data-data statistik yang cukup ini juga sangat berpengaruh bagi pengambil kebijakan maupun perencana pembangunan.

Pada bagian selanjutnya, Young membahas perkembangan dari tiga pendekatan utama dalam perdebatan mengenai keterlibatan perempuan dalam pembangunan yaitu *Women In Development (WID)*, *Women And Development (WAD)* serta *Gender and Development (GAD)*. Tiga pendekatan ini -- yang merupakan penjelasan atas diperhitungkannya dan dilibatkannya perempuan dalam perencanaan pembangunan -- diuraikan secara lengkap pada bagian akhir.

Secara keseluruhan, buku ini memberikan informasi yang cukup lengkap seputar masalah *gender*. Berbeda dengan buku-buku lain tentang *gender* dan feminisme yang biasanya langsung membahas hal-hal yang bersifat spesifik, misalnya tentang *gender* dan pembangunan (isu yang paling populer saat ini) atau studi kasus tentang penggunaan analisis *gender* untuk memahami suatu fenomena, buku ini mencoba mengupas semua aspek yang berkaitan dengan isu *gender*. Karena bersifat holistik, bahasannya terbatas pada hal-hal yang pokok seputar isu *gender*. Meskipun demikian, buku ini relatif mudah dipahami oleh pembaca terutama yang baru mulai menekuni studi tentang *gender*, karena disajikan dengan alur yang jelas. Sekalipun demikian, bukan berarti pembaca dalam 'tingkat lanjut' tidak dapat mengambil manfaat dari buku ini. Selain mengemukakan sejumlah kasus yang merupakan hasil penelitian beberapa pakar yang benar-benar memahami masalah *gender*, Young juga melengkapi tulisannya dengan daftar bacaan yang cukup panjang

untuk dipakai sebagai bahan perbandingan ataupun untuk memperluas wawasan pembaca. ♦

BERITA PERPUSTAKAAN

SISTEM PELAYANAN INFORMASI DI AKATIGA

Loe'ik Reflita Utami Dewi¹

(Bagian Kedua Dari Dua Tulisan²)

Yayasan AKATIGA sebagai lembaga penelitian memerlukan kekuatan informasi yang handal dan dapat dipercaya dalam menunjang kelancaran dan peningkatan mutu penelitian. Oleh karena itu, AKATIGA mendirikan infrastruktur informasi modern dengan koleksi sangat spesifik sesuai dengan bidang kajian dan kebutuhan penelitian AKATIGA.

Modern, karena pengelolaan informasi berbasis komputer sehingga kecepatan, ketepatan, dan keamanan proses pengelolaan serta pelayanan informasi dapat terus ditingkatkan dengan tujuan memuaskan pengguna. Di samping itu, AKATIGA juga menjadi anggota salah satu jaringan yang terhubung ke internet baik di Bandung maupun Jakarta. Keanggotaan pada jaringan internet ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan

pengaksesan informasi dari berbagai perpustakaan, bank data, pusat informasi, dan sumber informasi lainnya, serta untuk memudahkan komunikasi dengan berbagai sumber baik lembaga maupun individu.

Spesifik karena informasi yang dikoleksi dibatasi pada informasi yang berkaitan dengan bidang minat dan kajian AKATIGA. Hal ini sangat penting dilakukan guna menyelenggarakan pelayanan informasi yang efektif dan efisien.

♦ Pelayanan Informasi Perpustakaan Yayasan AKATIGA

Berbicara pelayanan informasi, tidak terlepas dari pengetahuan mengenai siapa pengguna sistem informasi, karakteristik kebutuhan informasi pengguna, lingkup subyek informasi,

¹ Pengelola perpustakaan AKATIGA - Pusat Analisis Sosial.

² Tulisan bagian pertama membahas masalah upaya memahami kebutuhan informasi.

tipe media yang digunakan, pelayanan informasi yang diberikan, teknologi informasi yang dibutuhkan, serta pengetahuan bagaimana pengguna mendayagunakan koleksi yang telah diperolehnya. Hal ini penting diketahui guna memantau profil pengguna dalam upaya meningkatkan dan mengevaluasi pelayanan informasi yang diberikan, sehingga tujuan pelayanan dapat direalisasikan.

♦ **Pengguna Perpustakaan AKATIGA**

Terdapat tujuh kelompok besar pengguna koleksi Perpustakaan AKATIGA, yaitu:

1. Peneliti; peneliti AKATIGA dan non-AKATIGA (dari dalam maupun luar negeri).
2. Mahasiswa Diploma, Strata Satu, dan Strata Dua dari berbagai Perguruan Tinggi.
3. Dosen berbagai Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.
4. Instansi Pemerintah.
5. ABRI
6. Wartawan.
7. Buruh.

Melihat kelompok pengguna yang cukup beragam, pengelola perpustakaan AKATIGA merumuskan profil pengguna koleksi perpustakaan sebagai upaya mempertemukan informasi yang spesifik

sesuai dengan kebutuhan informasi mereka.

♦ **Karakteristik Kebutuhan Informasi Pengguna**

Kebutuhan informasi pengguna perpustakaan AKATIGA pada umumnya terkelompokkan ke dalam (1) Kebutuhan informasi rutin (*everyday need approach*) yang bersifat spesifik dan menuntut jawaban cepat, serta (2) Kebutuhan informasi mendalam (*exhaustive need approach*) yang selain bersifat spesifik juga lengkap dan mendalam. Dengan demikian, pengadaan informasi yang bersifat spesifik, lengkap, dan mendalam, serta sesuai dengan lingkup subjek kajian AKATIGA menjadi prioritas utama.

♦ **Lingkup Subjek Informasi Perpustakaan AKATIGA**

Lingkup subjek informasi perpustakaan AKATIGA terbagi ke dalam lingkup subjek informasi utama dan penunjang. Adapun lingkup subjek informasi utama meliputi:

1. Tanah.
2. Tenaga Kerja.
3. Usaha Kecil.
4. Gender.

Sedangkan lingkup subjek penunjang meliputi:

1. Metodologi Penelitian.
2. Ekonomi.

3. Kehutanan.
4. Pertanian (Perkebunan, Perikanan, Peternakan).
5. Kependudukan.
6. Perkotaan.
7. Komputer.
8. Politik.
9. Perdagangan.

♦ **Tipe Media Informasi**

Tipe media informasi yang tersedia di perpustakaan AKATIGA adalah:

1. Buku.
2. Jurnal.
3. Artikel.
4. Laporan (laporan tahunan, laporan perjalanan, laporan hasil seminar/simposium/loka karya).
5. *Newsletter*.
6. *News Release*.
7. Majalah.
8. Proposal Penelitian.
9. Kumpulan Kliping.
10. Buletin.
11. Makalah/prosiding hasil seminar, simposium, loka karya.
12. Hasil penelitian (skripsi, tesis).
13. Katalog buku yang dimiliki lembaga lain.
14. Brosur dan Profil Perusahaan.
15. Kaset.
16. Foto.
17. Slide.

♦ **Pelayanan Informasi Perpustakaan AKATIGA**

Pelayanan Referensi

Pelayanan referensi yang diberikan perpustakaan AKATIGA dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kedalaman kebutuhan informasi pengguna, sehingga pengelolaan perpustakaan dapat mempertemukan informasi dengan pengguna-nya secara tepat, cepat, lengkap, dan sesuai dengan kebutuhan informasi pengguna. Dari hasil tanya jawab ini pengelola perpus-takaan menurunkannya dalam bentuk profil pengguna. Profil pengguna ini bermanfaat dalam menghemat waktu dan tenaga karena permintaan informasi pengguna relatif tetap sehingga profil pengguna dapat digunakan lebih lama dan berulang-ulang. Pembuatan profil pengguna untuk saat ini masih ditujukan bagi peneliti dan staf AKATIGA. Secara bertahap akan diberlakukan pula bagi pengguna luar.

Untuk memberikan jawaban yang optimal, pelayanan referensi ke luar pun melibatkan *subject specialist*, dalam hal ini adalah para peneliti AKATIGA untuk memberikan konsultasi bagi para pengguna luar.

Pelayanan Temu Balik Informasi

Pelayanan temu balik informasi ini merupakan rangkaian pelayanan referensi, yaitu suatu proses pencarian informasi yang diinginkan pengguna berdasarkan permintaan pada saat dilakukan pelayanan referensi.

Pelayanan Sirkulasi

Pelayanan sirkulasi merupakan rangkaian pelayanan referensi dan temu balik informasi. Setelah informasi yang diminta pengguna diperoleh, pengelola perpustakaan melayani peminjaman untuk peneliti dan staf AKATIGA serta jasa reproduksi untuk pengguna di luar peneliti dan staf AKATIGA atau sekedar di baca di ruang baca.

Pemencaran Informasi

Mensosialisasikan koleksi baru melalui rak pameran untuk buku baru dan buku terbitan AKATIGA, rak display untuk *newsletter*, tabel inventarisasi data koleksi terbaru pada papan pengumuman, daftar kumpulan kliping terbaru, penyebaran daftar publikasi AKATIGA, dan *print out* surat elektronik.

Jasa Reproduksi

Jasa reproduksi adalah suatu jasa penyediaan fotokopi yang merupakan suatu cara penyebaran informasi primer tanpa mengurangi koleksi perpustakaan. Hal ini dilakukan terutama untuk pengguna di luar peneliti dan staf AKATIGA, mengingat koleksi informasi yang dimiliki perpustakaan AKATIGA hanya satu eksemplar untuk setiap judul.

Pendidikan dan Pelatihan

Pengguna

Pendidikan dan pelatihan diberikan kepada pengguna dengan tujuan untuk meningkatkan apresiasi

pengguna terhadap sumber dan sistem informasi perpustakaan AKATIGA. Dengan demikian, para peneliti lebih dapat mengenali dan memahami sumber-sumber informasi dan jenis-jenis informasi yang mereka butuhkan, sehingga lebih terampil dalam mengenali kebutuhan informasi mereka dan menggunakan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Pelatihan/Magang

Pelatihan atau magang pengelolaan perpustakaan di perpustakaan AKATIGA merupakan salah satu bentuk kerja sama perpustakaan AKATIGA dengan lembaga-lembaga lain. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan perpustakaan, di samping sebagai *sharing information* antara pengelola perpustakaan AKATIGA dan pengelola perpustakaan lembaga lain, dan pengenalan atau praktek lapangan bagi para mahasiswa, diantaranya adalah mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran.

Clearing House Usaha Kecil

Pelayanan terbaru yang dioperasikan perpustakaan AKATIGA adalah *clearing house* untuk usaha kecil dengan lingkup tugas menyediakan berbagai dokumen asli dari berbagai lembaga dalam maupun luar negeri untuk kepentingan penelitian dan

analisis. *Clearing House* ini merupakan proyek kerja sama AKATIGA dengan The Asia Foundation.

♦ **Jaringan Kerjasama
Perpustakaan AKATIGA**

Dalam memenuhi kebutuhan informasi pengguna dan meningkatkan mutu layanan, saat ini perpustakaan AKATIGA telah membentuk jaringan kerja sama dengan (1) Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), (2) Bank Dunia, (3) Perpustakaan Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada (PPK-UGM), (4) Program Pengkajian dan Pengembangan Antropologi Ekologi Universitas Indonesia (P3AE-UI), (5) United Nation Development Programme, (6) Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan - LIPI. Dalam waktu dekat akan dijalin kerja sama dengan (1) Pusat Layanan Informasi Perempuan - Mitra Wacana dan (2) Indian Council of Social Science Research.

Selain lembaga-lembaga di atas, perpustakaan AKATIGA berencana akan menjajagi kerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang relevan dengan bidang kajian penelitian AKATIGA.

♦ **Teknologi Informasi**

Perpustakaan AKATIGA didukung oleh teknologi informasi berbasis komputer dengan menggunakan perangkat lunak CDS/ ISIS untuk proses pengelolaan koleksi dan program yang berbasis windows sebagai program yang membantu dalam mengerjakan proses administrasi dan keuangan. AKATIGA juga memanfaatkan teknologi Internet untuk mengakses informasi dari luar.

♦ **Pendayagunaan Koleksi
Perpustakaan AKATIGA**

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan selama ini, semua koleksi yang diakses lebih digunakan untuk kepentingan penelitian, analisis, dan menambah wawasan serta pengetahuan para pengguna. Hal ini memang sesuai dengan misi dan tujuan pendirian perpustakaan AKATIGA, oleh karenanya pengembangan koleksi pun lebih diarahkan untuk kepentingan ketiga hal di atas. ♦

SEPUTAR AKATIGA**Pertanahan**

Pada tanggal 17-18 Juli 1996, salah seorang peneliti AKATIGA berperan serta dalam lokakarya di Jakarta mengenai pembebasan tanah, pemukiman kembali, dan rehabilitasi penduduk yang terkena dampak pembangunan proyek infrastruktur. Loka karya ini diselenggarakan oleh *World Bank* dan dihadiri oleh kurang lebih 50 partisipan dari pemerintah pusat, Daerah Tingkat I dan pengelola proyek pengembangan perkotaan di tingkat lokal serta institusi terkait. Loka karya ini bertujuan untuk mengembangkan pengertian bersama pemerintah Indonesia, lembaga donor dan PEMDA mengenai prinsip-prinsip dasar untuk memperbaiki proses pembebasan tanah dan pemukiman kembali. Loka karya ini akan menyediakan informasi mengenai kebijakan dan petunjuk pelaksanaan yang akhir-akhir ini dikembangkan di berbagai negara dan mengundang partisipan untuk mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan pengembangan per-baikannya sistem di Indonesia.

Pada tanggal 2-3 September 1996 salah seorang staf peneliti AKATIGA menghadiri workshop di

Bogor yang diselenggarakan oleh Konsorsium Sistem Hutan Kerakyatan (SHK). Workshop ini dihadiri oleh LSM-LSM dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Materi yang dibahas adalah sistem hutan kerakyatan di mana model sistem pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat asli sekarang ini cenderung diabaikan dan tidak diakui oleh pengelolaan hutan nasional semisal HPH dan HTI. Kasus-kasus dalam workshop ini diambil dari Kalimantan Timur dan Sumatera.

Pada tanggal 30 September 1996, salah seorang staf peneliti AKATIGA menjadi peserta dalam *Round Table* Hukum Agraria yang diselenggarakan oleh LBH Surabaya. Kontradiksi dalam Hukum Agraria dan berbagai dampaknya, serta bagaimana politik agraria Orde Baru dikaitkan dengan UUPA merupakan tema yang dibahas dalam diskusi ini. Diskusi ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Ulangtahun UUPA ke-36 yang bertujuan untuk mengidentifikasi sumber-sumber masalah kontradiksi hukum keagrariaan dan konflik sektoral yang ada di dalamnya. Adapun sumber kajian mengenai kontradiksi hukum keagrariaan ini dilihat dari banyak perspektif, yakni dari perspektif

hukum, konflik agraria yang terjadi, reaksi masyarakat (khususnya petani kecil), dan proses penyelesaian.

Perburuan

Tanggal 10-13 September 1996, salah seorang peneliti AKATIGA mengikuti Konferensi Internasional Mengenai Anak Jalanan dan Lokakarya Nasional Pasca Konferensi tentang Pola Nasional Usaha Pemberdayaan Anak Jalan-an, yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Propinsi DIY. Tujuan Konferensi dan Loka karya ini di antaranya pertama, untuk bertukar pengalaman dan pengetahuan serta memperluas wawasan tentang permasalahan anak jalanan. Kedua, meningkatkan kerjasama di tingkat internasional, regional maupun nasional dalam usaha pemberdayaan anak jalanan. Ketiga, meningkatkan kepedulian berbagai pihak terhadap permasalahan anak jalanan dalam upaya menciptakan iklim kebijakan yang kondusif dan dapat mendorong pihak eksekutif, legis-latif dan masyarakat untuk ber-upaya secara nyata dalam pemberdayaan anak jalanan terutama dalam masalah perlindungan hukum.

Tanggal 24-26 Juli 1996, dua orang peneliti AKATIGA mengikuti Konferensi Nasional II masalah Pekerja Anak di Indonesia.

Konferensi ini diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) bekerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja dan ILO's International Programme on the Elimination of Child Labor (ILO's IPEC). Acara yang dihadiri oleh pihak pemerintah dan diikuti oleh Per-guruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Lembaga Swadaya masyarakat dan Organisasi Sosial ini selain bertujuan untuk meningkatkan ke-pedulian berbagai pihak terhadap masalah pekerja anak, juga ber-tujuan untuk mengevaluasi kema-juan pelaksanaan deklarasi dan rencana aksi yang telah dihasilkan oleh Konferensi Nasional I yang telah dilaksanakan pada tahun 1993.

Usaha Kecil

Pada tanggal 20-21 Nopember 1996, AKATIGA bekerja sama dengan Departemen Koperasi & PPK dan The Asia Foundation menyelenggarakan Loka karya mengenai Kebijakan Untuk Mendukung Strategi Kemitraan Usaha di Indonesia. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah menghimpun ide-ide atau pikiran-pikiran yang menjadi masukan bagi penyempurnaan Peraturan Pelaksanaan UU RI No.9 Th.1995 tentang Usaha Kecil. Diskusi ini dihadiri berbagai kalangan, seperti pemerintah, praktisi, LSM, dan individu-indi-

vidu yang mengamati dan bergerak dalam pengembangan usaha kecil.

Diskusi berkisar pada model-model kemitraan yang sekarang ini diterapkan di Indonesia, secara sederhana dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis kemitraan, yaitu kemitraan yang terjadi atas inisiatif pasar dan kemitraan yang terjadi atas intervensi/dorongan pemerint-tah. Di kedua jenis kemitraan ini memiliki kelemahan sekaligus ke-kuatanya masing-masing. Analisis tentang kekuatan dan kelemahan ini menjadi semakin menarik jika dimatrikskan dengan aktor-aktor terlibat (pemerintah atau swasta) dan secara sektoral (pertanian dan industri) serta skala usaha (besar dan kecil). Karena jenis kemitraan, aktor, sektor, dan skala usaha yang berlainan dapat memberikan pengalaman kegagalan/keberhasilan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pengalaman-pengalaman inilah yang digunakan sebagai input untuk penyempurnaan PP yang bersangkutan, baik peng-alaman yang sifatnya best practices maupun *cost eectiveness* bagi pengembangan pola kemitraan di Indonesia.

Catatan: makalah-makalah loka karya ini dapat diakses di perpustakaan AKATIGA

Lain-lain

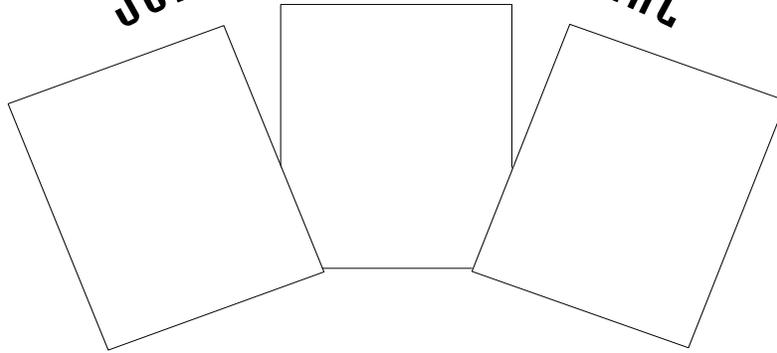
Pada tanggal 12 November sampai 15 November 1996 seorang staf

AKATIGA mengikuti Kursus Internet yang diselenggarakan oleh Sustainable Development Network Program (SDNP) Indonesia be-kerja sama dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan PIKSI - ITB, bertempat di PIKSI - ITB. Kursus ini diikuti oleh 15 LSM. Tujuannya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan LSM dalam pencarian dan penge-lolaaan informasi.

Materi yang diberikan selama kursus, mulai dari pengenalan komputer, operating sistem yang dipakai sampai dengan cara mencari informasi di Internet. Kepada para peserta juga diperkenalkan sistem operasi Unix (Linux) dan Windows 95 untuk melakukan komunikasi. Target dari kursus singkat ini adalah:

- peserta dapat mengetahui manfaat jaringan komputer untuk komunikasi data; dan
- peserta dapat memanfaatkan internet bagi kepentingan komunikasi serta penyebarannya.

JURNAL ANALISIS SOSIAL



Jurnal Edisi-1 : *Buruh dan Krisis Hubungan Industrial*
Tebal : 44 hlm.
Harga : Tidak untuk dijual (diberikan cuma-cuma bagi pembeli buku atau jurnal edisi lainnya)

Jurnal edisi perdana ini mengangkat topik di seputar dinamika dan pergolakan buruh di Indonesia. Melalui edisi perdana ini pembaca diajak untuk mengkritisi persoalan perburuhan dan dinamikanya, melalui analisis terhadap *Politik Perburuhan, Beberapa Catatan Mengenai Pemogokan Buruh, Krisis Perburuhan Dalam Hubungan Industrial, Koalisi Buruh dan Kelas Menengah*, serta analisis mengenai *Gerak Modal dan Tenaga Kerja*.

Pada edisi perkenalan ini, pembaca juga akan diajak untuk melongok ruang Metodologi yang mengangkat tema *Pendekatan Konvensional Dan Pendekatan Alternatif Dalam Penelitian Sosial*, ruang Resensi yang mengupas buku *Women and The Labour Market*, serta melongok seputar kegiatan AKATIGA.

Jurnal Edisi-2 : *Tantangan Globalisasi: Mampukah Usaha Rakyat Menjadi Aktor Utama Dalam Perekonomian Nasional*

Tebal : 127 hlm.
Harga : Rp4.000,00

Menghadapi era globalisasi, di mana liberalisasi ekonomi mendunia, ada pertanyaan; bagaimana dengan usaha rakyat dalam era ini. Mampukah usaha rakyat menjadi aktor utama dalam perekonomian Nasional? Sementara banyak hal yang membuat usaha rakyat “tak berdaya” sekalipun dalam situasi saat ini, sebelum masa globalisasi itu datang.

Dalam konteks globalisasi tersebut, Ruang Bahasan Utama Jurnal edisi 2 ini mencoba mengupas masalah-masalah *Eksistensi Usaha Rakyat Dalam Perspektif Globalisasi; Pengembangan Daya Saing Industri Kecil dan Menengah; Pengembangan Jaringan Usaha Bagi Usaha Kecil dan Menengah; Mencari Format Kebijakan Pengembangan Usaha Rakyat; Pekerja Perempuan Dalam Globalisasi Ekonomi; dan Isu Lingkungan Dalam Pengembangan Usaha Kecil.*

Selain bahasan utama di atas, dikupas pula *masalah Metodologi Penelitian Sosial: Suatu Pengantar* dalam ruang Metodologi, *Perempuan Juga Ingin Diperhatikan* dalam ruang Resensi, dan *Manfaat Internet untuk Mencari Informasi* dalam ruang Berita Perustakaan.

Jurnal edisi-3 : *Tanah: Komoditas Strategis?*
Tebal : 102 hlm.
Harga : Rp4.000,00

Mengemukakan pandangan mengenai tanah sebagai komoditas strategis dalam pembangunan di Indonesia yang disampaikan oleh Kepala BPN/Menteri Negara Agraria, mengundang perdebatan: Benarkah tanah harus dianggap dan diperlakukan sebagai komoditas untuk mendukung proses pembangunan bangsa?

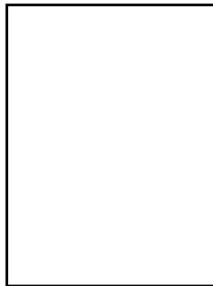
Jurnal edisi ketiga ini mencoba mengkritisi pandangan Kepala BPN/Menteri Agraria tersebut, dimulai dengan membahas *Fungsi Tanah Dalam Kapitalisme*, dilanjutkan dengan *Tanah: Aset Utama Pembangunan, Jangan Perlakukan Tanah Sebagai Komoditi*, dan ditutup dengan *Reformasi Menuju Pasar Tanah*

PUBLIKASI

yang Efisien: Peta Kebijakan, Penguasaan, dan Sengketa Tanah di Akhir Abad 20.

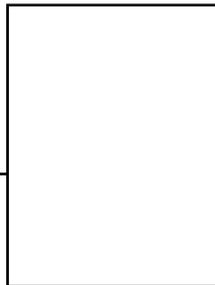
Tulisan lain yang menarik juga untuk dicermati adalah *Focus Groups: Kembalinya si Anak Hilang* dalam ruang Metodologi; *Upaya Memahami Kebutuhan Informasi* dalam ruang Berita Perpustakaan *Pertumbuhan Kota Yang Tak Lagi Memusat* dalam ruang Resensi, serta seputar kegiatan AKATIGA.

BUKU TERBITAN 1996



Judul Buku : *Usaha Rakyat Dalam Pola Desentralisasi
Produksi Subkontrak*
Penulis : Frida Rustiani dan Maspiyati
Tebal : 90 hlm.
Harga : Rp8.000,00

Implementasi pola hubungan subkontrak pada industri logam di Tegal, sebenarnya dapat menjadi pilihan strategis bagi bengkel-bengkel kecil untuk dapat berproduksi dan mengembangkan usahanya. Beberapa bukti menunjukkan hubungan subkontrak mampu mendorong perluasan pasar dan pengembangan teknologi yang pada gilirannya mendukung pengembangan usaha. Namun sayang, pada kasus subkontrak di Tegal peluang ini hanya bisa diraih oleh bengkel-bengkel besar yang memang mampu memenuhi segala persyaratan yang diajukan oleh prinsipalnya. Sementara bagi bengkel kecil, peluang tersebut hanya jadi mimpi yang entah kapan dapat diraih. Perbedaan peraih peluang ini terjadi karena adanya fenomena subkontrak bertingkat.

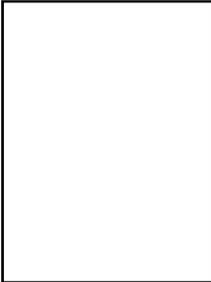


Judul Buku : *Pengembangan Ekonomi Rakyat Dalam
Era Globalisasi: Masalah, Peluang, dan
Strategi Praktis*

Edisi 4/November 1996 91

Penulis : Frida Rustian (ed.)
Tebal : 303 hlm.
Harga : Rp15.500,00

Menghadapi era globalisasi yang ditandai dengan makin ketatnya tingkat kompetisi, usaha rakyat harus dapat memberdayakan diri agar tidak tersingkir dari percaturan pasar dunia. Padahal dalam berkompetisi di pasar dunia ini, usaha rakyat akan menghadapi persoalan serius karena berbagai kendala yang kerap menyertai keberadaannya. Kita memang tak dapat menafikan kenyataan bahwa globalisasi dapat membuka peluang bagi usaha rakyat untuk turut serta dalam perdagangan bebas. Hanya saja peluang yang ada baru dapat diraih dengan berbagai syarat yang belum tentu dapat dipenuhi usaha rakyat.



Judul Buku : *Dehumanisasi Anak Marjinal: Berbagai Pengalaman Pemberdayaan*
Penulis : Surya Mulandar (ed.)
Tebal : 185 hlm.
Harga : Rp12.500,00

Tak dapat dipungkiri bahwa fenomena buruh anak dan anak jalanan merupakan produk pemiskinan di kota maupun di desa. Sebagai produk kemiskinan, jelas mereka marjinal. Bahkan pemerintah seakan “mengingkari” keberadaannya; terbukti dengan tiadanya perlindungan secara yuridis formal bagi kelompok ini, terutama bagi buruh anak. Walhasil buruh anak harus menanggung beban eksploitasi bertingkat. Pertama eksploitasi dari keluarga dalam posisinya sebagai anak dengan keharusan mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga. Kedua, eksploitasi dari majikan dalam posisinya sebagai buruh yang tidak dianggap dan tidak dihargai sebagai pekerja pada umumnya. Ketiga, eksploitasi dari lingkungan kerja, dalam hal ini eksploitasi dari kelompok buruh dewasa.

PUBLIKASI

Keadaan akan bertambah buruk bila buruh anak itu adalah anak jalanan. Selain harus menghadapi eksploitasi dari lingkungan kerja, anak jalanan juga harus berjuang menghadapi berbagai gangguan dari lingkungan tempat tinggalnya; jalanan. Di kota-kota tertentu, kelompok anak jalanan ini kerap menjadi sasaran empuk penculik-penculik. Mereka yang berhasil diculik kemudian dipekerjakan secara paksa di jermal-jermal yang kondisinya sangat tidak manusiawi.



Judul Buku : *Disharmoni Inti-Plasma Dalam Pola PIR:
Kasus PIR Pangan Pada Agroindustri
Nanas Subang*
Penulis : Erna Ermawati Chotim
Tebal : 91 hlm.
Harga : Rp7.000,00

Secara normatif, konsep *Contract Farming* menyiratkan adanya kemungkinan dan harapan bagi aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, dalam hal ini inti dan plasma, untuk keluar dari persoalan yang mereka hadapi. Namun realitas di lapangan pada kasus PIR-Pangan Nanas ini menunjukkan hal yang berbeda. Pada kasus ini harapan petani maupun inti sama sekali tidak terpenuhi.



Judul Buku : *Etika Penulisan Karya Ilmiah: Beberapa
Butir Prinsip Dasar (Khusus Untuk Ilmu-
ilmu Sosial*
Penulis : Gunawan Wiradi
Tebal : 53 hlm.

Edisi 4/November 1996 93

Harga : Rp5.000,00

Etika penulisan karya ilmiah merupakan prinsip moral yang harus menjadi sikap batin penulis dan harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Tuntutan moral ini kemudian melahirkan prinsip penata yang mengatur tata cara penulisan ilmiah yang harus dipenuhi penulis tanpa memperhatikan sikap batin-nya. Prinsip penata "memaksa" penulis memenuhi aturan-aturan penulisan ilmiah agar terhindar dari tuduhan-tuduhan plagiarism. Bagaimana wujud prinsip penata tersebut, itulah yang menarik untuk kita cermati dalam buku saku ini. ♦



AKATIGA pusat analisis sosial adalah lembaga penelitian nirlaba yang melakukan berbagai kegiatan penelitian, pelatihan, penerbitan, pengembangan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan, dan advokasi kebijakan pembangunan.

Dalam menjalankan aktivitasnya, AKATIGA mengembangkan prinsip independen, multidisiplin, partisipatif, dan berorientasi pada upaya penguatan posisi masyarakat sipil, khususnya mereka yang lemah dan tertinggal dalam proses pembangunan. Upaya penguatan tersebut dilakukan melalui kajian kritis terhadap proses dan kebijakan pembangunan yang berdampak pada rakyat kecil. AKATIGA mengembangkan kegiatan-kegiatan pengembangan informasi, publikasi, dokumentasi, serta pelatihan. Hasil-hasil penelitian tersebut diolah menjadi informasi dan analisis yang ditujukan untuk perkembangan wacana maupun untuk menunjang kerja-kerja pemberdayaan dan advokasi yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah dan masyarakat akar rumput.

AKATIGA melakukan advokasi melalui kerjasama dengan jaringan-jaringan yang relevan, strategis dan mampu menjangkau komunitas/kelompok di lapisan bawah yang tersisihkan. AKATIGA juga mengembangkan jasa pelayanan dalam bentuk pelatihan metodologi penelitian yang terutama ditujukan kepada ornop. Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas analisis ornop dalam rangka menyusun strategi yang lebih tepat sasaran dan advokasi yang lebih kontekstual.

Seluruh kegiatan AKATIGA ditujukan untuk mendorong terbukanya peluang bagi perbaikan kehidupan kelompok miskin dan untuk membangkitkan kemandiriannya agar tidak terus tersisih dalam proses pembangunan.



AKATIGA
pusat analisis sosial

Jl. Tubagus Ismail II No. 2 Bandung 40134 - Indonesia

Telp: 022-2502502 - Fax: 022-2535824

Email: akatiga@indo.net.id

www.akatiga.org